



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



Sumarjana, S.Sos.
CAMAT PURWODADI



Veny Yudha Apriyani, S.STP, M.H.
SEKRETARIS KECAMATAN PURWODADI



**KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Profil Organisasi.....	2
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3.2 Sumber Daya Manusia.....	6
1.3.3 Sumber Daya Anggaran.....	7
1.4 Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	8
1.4.1 Aspek Strategis	8
1.4.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD.....	12
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 2025.....	13
2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....	14
2.4 Perjanjian Kinerja tahun 2025.....	14
2.5 Hasil Tindak Lanjut Tahun 2024.....	16
2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025.....	22
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dan	
3.1.3 membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	33
3.3 Inovasi.....	36
3.4 Penghargaan.....	36
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja.....	37
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	37

LAMPIRAN

1. Daftar referensi
2. SK Tim Penyusun LKjIP 2025
3. SK Penetapan LKjIP
4. PK PD Murni dan Perubahan
5. Laporan realisasi anggaran per program, Kegiatan, Sub Kegiatan PD
6. SK IKU PD
7. Hasil SKM Tahun 2025
8. Hasil realisasi fisik dan keuangan program, kegiatan, subkegiatan
9. Penghargaan dan dokumentasi penghargaan yang diterima PD

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pegawai Berdasar Pangkat dan Golongan.....	7
Tabel 1.2 Pegawai Berdasar Eselon.....	7
Tabel 1.3 Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan.....	7
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	12
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	13
Tabel 2.3 Struktur Program Kecamatan Purwodadi Tahun.....	14
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Camat Purwodadi.....	15
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Purwodadi.....	16
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	22
Tabel 3.2 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	22
Tabel 3.3 Target dan Realisasi.....	23
Tabel 3.4 Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran.....	24
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Tahun 2025.....	28
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	33

DAFTAR GAMBAR

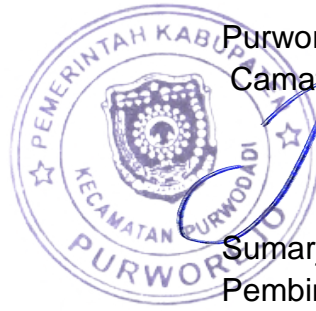
	Halaman
Gambar 2.1 Halaman Login Sawiji.....	18
Gambar 2.2 Halaman Dashboard Sawiji	18
Gambar 2.3 Halaman Login Aplikasi E-Kinerja.....	19
Gambar 2.4 Tampilan Aplikasi E-Kinerja.....	20
Gambar 2.5 Halaman Login Aplikasi ESR MENPAN.....	21
Gambar 2.6 Tampilan Aplikasi ESR MENPAN.....	21

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Purwodadi dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Purwodadi ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*, serta sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi.

Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Purwodadi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo.



Purworejo, 25 Februari 2026
Camat Purwodadi

Sumarjana, S.Sos.
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19690612 199001 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Purwodadi memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tata laksana, serta dalam pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat. Dalam menjalankan peran tersebut, Kecamatan Purwodadi memikul tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government).

Penerapan tata kelola pemerintahan (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Kecamatan Purwodadi senantiasa berupaya meningkatkan penerapan ketiga prinsip tersebut pada seluruh bidang urusan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan memahami tugas pokok serta fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif, stabil, dan dinamis. Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan suatu instrumen yang mampu mengukur tingkat kinerja dan indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dimiliki, yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sebagai bagian dari instansi pemerintah daerah, Kecamatan

Purwodadi menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang memuat gambaran capaian kinerja selama satu tahun anggaran, sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo dimaksudkan sebagai bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja Kecamatan Purwodadi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Tahun 2021–2026 yang mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Purwodadi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur dan akuntabel kepada pemberi mandat, yaitu Bupati Purworejo, mengenai tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Purwodadi selama Tahun 2025.
2. Menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja secara berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Purwodadi.

1.3 Profil Organisasi

Kewenangan Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Kecamatan Purwodadi Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Camat

Camat bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemerintahan desa, pembangunan, ketentraman, ketertiban, dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

- 1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/ Kelurahan dan Kecamatan;
- 2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- 3) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- 4) melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan;
- 5) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi:

- 1) melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- 2) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan dan;
- 3) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati meliputi:

- 1) melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
- 2) melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- 3) melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ; dan
- 4) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi:

- 1) melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 2) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 3) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan meliputi:

- 1) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- 3) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
- 4) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;

Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan meliputi:

- 1) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- 2) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan /atau kelurahan;
- 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan atau Lurah;
- 4) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan/ atau Kelurahan;
- 5) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- 6) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;

- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan;
- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.

Camat dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Camat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud, membentuk forum koordinasi pimpinan Kecamatan.

Susunan keanggotaan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.

Susunan keanggotaan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. Camat sebagai Ketua;
- b. Pimpinan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan sebagai anggota; dan
- c. Pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan sebagai Anggota.

Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

1.3.3 Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Purwodadi berdasarkan Golongan, Jabatan/ Eselonering dan Pendidikan sebanyak 12 orang.

Adapun rincian sumber daya manusia di Kecamatan Purwodadi pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pegawai Berdasar Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Tk. 1 (IV.b)	1 orang
2	Pembina (IV.a)	1 orang
3	Penata Tk. I (III.d)	3 orang
5	Penata Muda Tk. I (III b)	2 orang
7	Pengatur Tk. I (II d)	4 orang
8	Pengatur (II c)	1 orang
9	Golongan VII	1 orang

Sumber: Daftar Pegawai Kec. Purwodadi Tahun 2025

Tabel 1.2
Pegawai Berdasar Eselon

NO	ESELON	JUMLAH
1	Camat / Eselon III a	1 orang
2	Sekcam / Eselon III b	1 orang
3	Kepala Seksi / Eselon IV a	3 orang
4	Kepala Subagian / Eselon IV b	1 orang

Sumber : Daftar Pegawai Kec. Purwodadi Tahun 2025

Tabel 1.3
Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S 2)	1 orang
2	Sarjana (S 1)	6 orang
3	Sarjana Muda (D 3)	2 orang
4	SLTA	9 orang
5	SLTP	- orang
6	SD	- orang

Sumber : Daftar pegawai Kecamatan Purwodadi Tahun 2025

1.3.3 Sumber Daya Anggaran

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, telah di alokasikan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Purworejo sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 beserta dengan perubahannya. Daftar Program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran yang ditetapkan sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kecamatan Purwodadi Tahun Anggaran 2024, Nomor: DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2025 Tanggal 2 Januari 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kecamatan Purwodadi Tahun Anggaran 2025, Nomor: DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2025 Tanggal 12 Agustus 2025. Sumber Daya Anggaran Kecamatan Purwodadi berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Purwodadi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.128.635.974 bersumber dana dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.

1.4 Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1.4.1 Aspek Strategis

Aspek strategis merupakan kondisi internal dan eksternal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Purwodadi. Aspek ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, penetapan sasaran strategis, serta pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.

Secara internal, aspek strategis Kecamatan Purwodadi meliputi ketersediaan dan kualitas sumber daya aparatur, struktur organisasi, tata kelola administrasi pemerintahan, serta dukungan sarana dan prasarana kerja. Kemampuan aparatur dalam memahami tugas pokok dan fungsi, penguasaan regulasi, serta penerapan sistem kerja yang efektif dan akuntabel menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian kinerja kecamatan.

Sementara itu, aspek eksternal mencakup dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, perkembangan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta kondisi sosial, ekonomi, dan wilayah Kecamatan Purwodadi.

Perubahan regulasi dan meningkatnya ekspektasi masyarakat menuntut kecamatan untuk mampu beradaptasi secara cepat dan responsif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Dengan memperhatikan berbagai aspek strategis tersebut, Kecamatan Purwodadi diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang tepat guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

1.4.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis perangkat daerah merupakan permasalahan atau tantangan utama yang dihadapi Kecamatan Purwodadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis kecamatan. Identifikasi isu strategis dilakukan sebagai dasar dalam penentuan prioritas kebijakan dan perbaikan kinerja.

Isu strategis Kecamatan Purwodadi antara lain berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya aparatur, optimalisasi koordinasi dengan pemerintah desa dan perangkat daerah terkait, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik dan administrasi pemerintahan secara efektif dan efisien.

Dalam menghadapi isu-isu strategis tersebut, Kecamatan Purwodadi perlu melakukan berbagai upaya perbaikan dan inovasi, baik melalui peningkatan kompetensi aparatur, penyederhanaan prosedur pelayanan, penguatan koordinasi lintas sektor, maupun pemanfaatan teknologi informasi. Penanganan isu strategis secara tepat diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja kecamatan

secara berkelanjutan dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan LKJIP Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini diuraikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dengan melakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini berisi tentang uraian kesimpulan atas capaian kinerja BPKPAD Kabupaten Purworejo tahun 2024 dan rekomendasi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi didasarkan pada potensi, permasalahan, serta isu-isu strategis yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Purwodadi. Tujuan tersebut menjadi arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan jangka menengah, yaitu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan Kecamatan Purwodadi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Tahun 2021–2026 adalah peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh Kecamatan Purwodadi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran dirumuskan sebagai dasar dalam penetapan indikator kinerja dan pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan.

Sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Kecamatan Purwodadi yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Tahun 2021–2026 adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks kepuasan masyarakat (IKM) perangkat Daerah	88	88,30	88,50	89	89,50
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) perangkat Daerah	88	88,30	88,50	89	89,50

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025

Strategi merupakan cara atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam kebijakan serta program dan kegiatan. Strategi disusun dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal organisasi guna memastikan pencapaian kinerja secara efektif dan berkelanjutan.

Strategi Kecamatan Purwodadi dalam mencapai tujuan dan sasaran pada Tahun 2025 adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan layanan kepada masyarakat.

Kebijakan strategis merupakan pernyataan yang menggambarkan arah dan langkah yang ditempuh dalam mencapai sasaran, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam serangkaian kebijakan operasional. Kebijakan tersebut menjadi pedoman dalam penentuan konfigurasi program, kegiatan, dan subkegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan.

Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaksanaan program serta kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maupun bersifat eksternal, yaitu kebijakan yang diarahkan untuk mengatur, mendorong, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Adapun arah kebijakan Kecamatan Purwodadi yang ditetapkan pada Tahun 2025 adalah peningkatan kualitas koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pemberdayaan masyarakat di seluruh wilayah kerja Kecamatan Purwodadi, serta peningkatan kualitas pelayanan terpadu sesuai dengan kewenangan kecamatan.

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Purworejo Berdaya Saing 2025			
Misi IV : Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya jenis pelayanan Kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan layanan	Peningkatan kualitas koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketenteraman ketertiban umum dan pemberdayaan masyarakat pada semua wilayah kerjanya, dan meningkatkan kualitas pelayanan terpadu dalam kewenangannya.

2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Tabel 2.3 Struktur Program Kecamatan Purwodadi Tahun 2025

NO	KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	2.115.232.267
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	12.955.000
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %	91.264.000
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	10.291.000
6	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	17.050.000
7	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	37.595.000

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen dan kesepakatan kinerja antara pimpinan instansi pemerintah dengan atasan langsungnya sebagai wujud pelaksanaan perencanaan kinerja tahunan. Perjanjian Kinerja memuat target kinerja yang akan dicapai sebagai dasar pengukuran dan evaluasi atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Perjanjian Kinerja memberikan kejelasan mengenai hasil yang diharapkan serta menjadi instrumen dalam penetapan prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dengan sumber daya yang terbatas. Melalui perencanaan kinerja yang terarah, pengelolaan program dan kegiatan diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih fokus, efektif, dan efisien, sehingga dapat meminimalkan

pelaksanaan kegiatan yang tidak selaras dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2026, yang disusun dalam rangka memenuhi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Strategis tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Purwodadi, Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi Tahun 2025, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Purwodadi Tahun Anggaran 2025.

Dalam pelaksanaannya, Kecamatan Purwodadi telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan organisasi. Perjanjian Kinerja tersebut disusun untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Purwodadi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna mencapai tujuan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Purworejo. Penetapan Kinerja antara Bupati Purworejo dan Camat Purwodadi dalam bentuk Perjanjian Kinerja sasaran Tahun 2025 selanjutnya disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Camat Purwodadi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	92,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.189.223.740	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 49.202.000	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 153.833.000	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 32.876.000	APBD

5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	33.320.000	APBD
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	84.573.000	APBD
Jumlah		Rp	2.543.027.740	

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Purwodadi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	92,00
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.115.232.267	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 12.955.00	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 91.164.000	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 10.291.000	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 17.050.000	APBD
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 37.595.000	APBD
Jumlah		Rp 2.284.387.267	

2.5 Hasil Tindak Lanjut Tahun 2024

Hasil tindak lanjut Tahun 2024 merupakan upaya perbaikan berkelanjutan yang dilakukan oleh Kecamatan Purwodadi atas hasil evaluasi kinerja dan rekomendasi yang diperoleh pada periode sebelumnya. Tindak lanjut tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja instansi sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan tindak lanjut pada Tahun 2024 difokuskan pada penyempurnaan perencanaan kinerja, penguatan sistem pengendalian internal, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain melalui penyesuaian indikator kinerja agar lebih terukur dan relevan, peningkatan kualitas data pendukung kinerja, serta penguatan koordinasi antarunit kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Selain itu, Kecamatan Purwodadi juga melakukan optimalisasi pemanfaatan aplikasi pendukung kinerja, seperti sistem monitoring dan evaluasi kinerja serta aplikasi penilaian kinerja aparatur, guna meningkatkan ketepatan pelaporan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pembinaan dan pendampingan teknis turut dilaksanakan untuk mendukung pemahaman terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil dari pelaksanaan tindak lanjut tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program, perbaikan kualitas pelaporan kinerja, serta meningkatnya kesadaran aparatur terhadap pentingnya pencapaian kinerja yang berorientasi pada hasil. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan dan akan menjadi fokus perbaikan pada Tahun 2025, khususnya dalam penguatan pengukuran kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam rangka mencapai target kinerja secara optimal, Kecamatan Purwodadi menerapkan berbagai instrumen pendukung untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Instrumen pendukung tersebut berperan dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kinerja instansi. Instrumen pendukung capaian kinerja yang telah diimplementasikan oleh Kecamatan Purwodadi antara lain sebagai berikut:

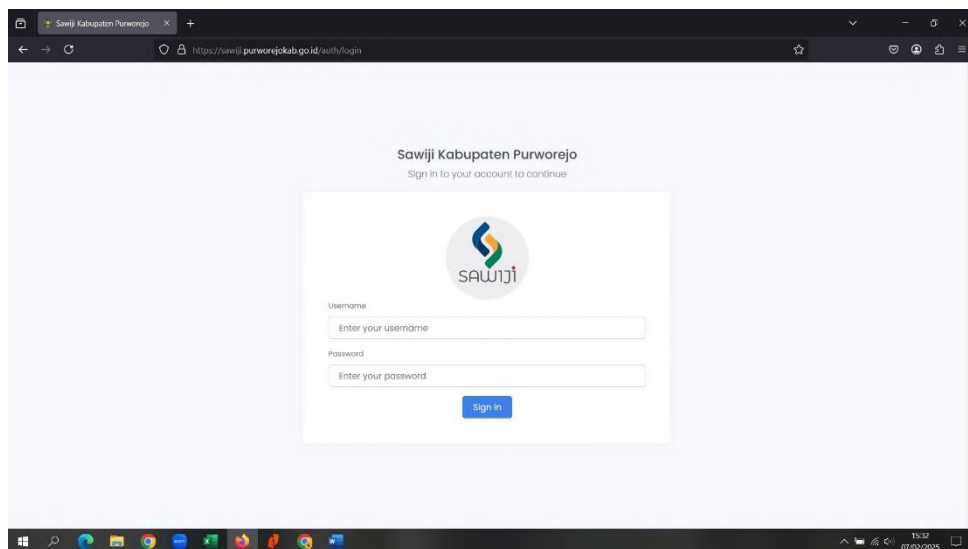
1. Aplikasi SAWIJI

Sistem Akuntabilitas Wahana Evaluasi Kinerja Terintegrasi (SAWIJI) merupakan aplikasi yang dirancang untuk mendukung pengelolaan dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan kinerja, memantau capaian kinerja, serta menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi.

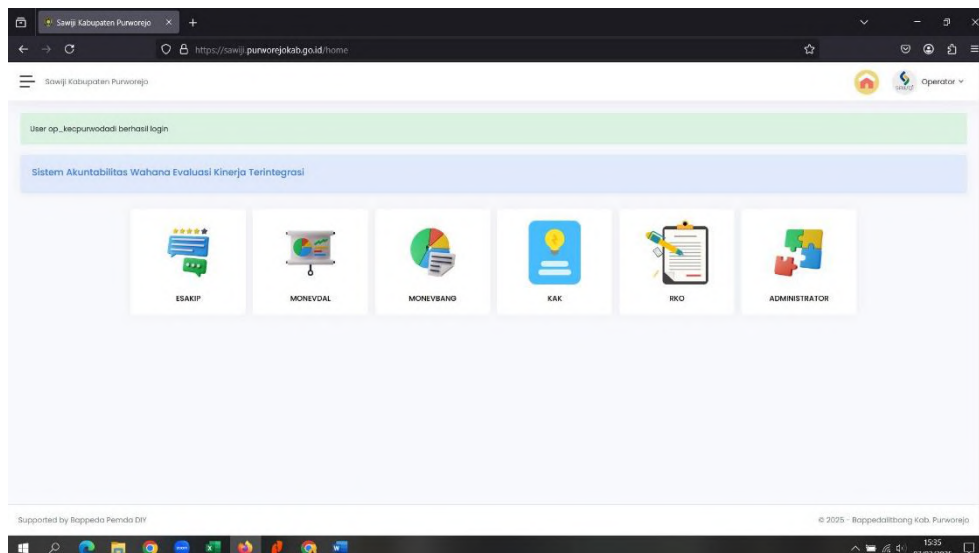
Melalui aplikasi SAWIJI, dilakukan integrasi data realisasi keuangan dan realisasi kinerja indikator ke dalam formulir monitoring dan evaluasi

triwulanan yang telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Penerapan konsep single input multiple output memungkinkan satu kali proses input data menghasilkan berbagai jenis laporan yang dibutuhkan.

Pemanfaatan aplikasi SAWIJI diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan, serta meningkatkan akurasi data dan kualitas evaluasi kinerja Kecamatan Purwodadi.



Gambar 2.1 Halaman *Login* Sawiji



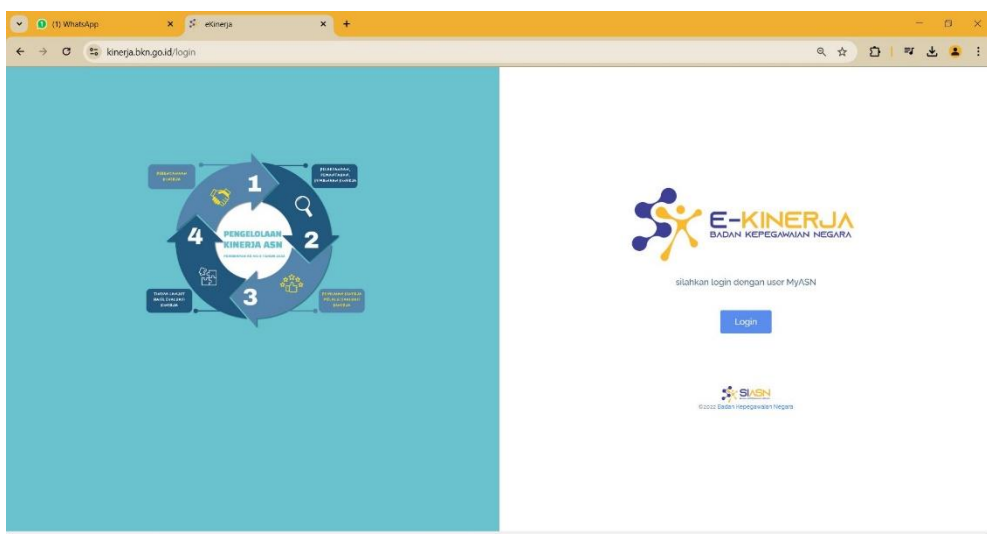
Gambar 2.2 Halaman *Dashboard* Sawiji

2. E-Kinerja BKN

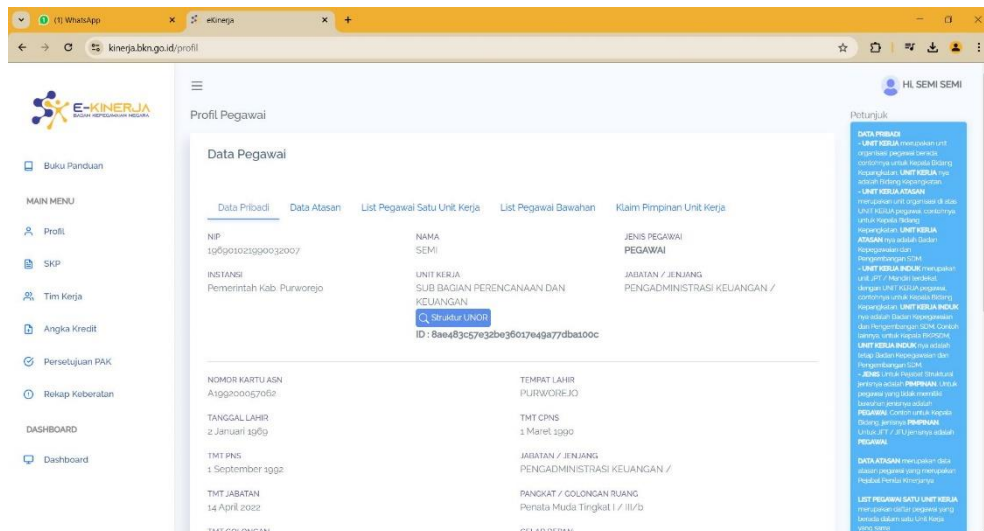
E-Kinerja merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendukung pengelolaan, pemantauan, dan penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara secara elektronik. Aplikasi ini digunakan sebagai instrumen dalam penerapan manajemen kinerja ASN yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Penerapan E-Kinerja bertujuan untuk mewujudkan tata kelola kepegawaian yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi. Melalui aplikasi ini, kinerja pegawai dapat dipantau dan dievaluasi secara periodik berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan, baik pada tingkat individu maupun unit kerja. Kecamatan Purwodadi telah menerapkan aplikasi E-Kinerja BKN sejak Tahun 2023 untuk pelaksanaan penilaian kinerja bulanan dan penilaian kinerja tahunan aparatur. Penerapan E-Kinerja diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai, mendukung efisiensi birokrasi, serta memperkuat keterkaitan antara kinerja individu dengan pencapaian kinerja organisasi.

Keberhasilan implementasi E-Kinerja memerlukan komitmen dan konsistensi seluruh aparatur, serta dukungan infrastruktur teknologi dan peningkatan kompetensi melalui pelatihan yang berkelanjutan.



Gambar 2.3 Halaman *Login* Aplikasi E-Kinerja



Gambar 2.4 Tampilan Aplikasi E-Kinerja

3. ESR Kementerian PANRB

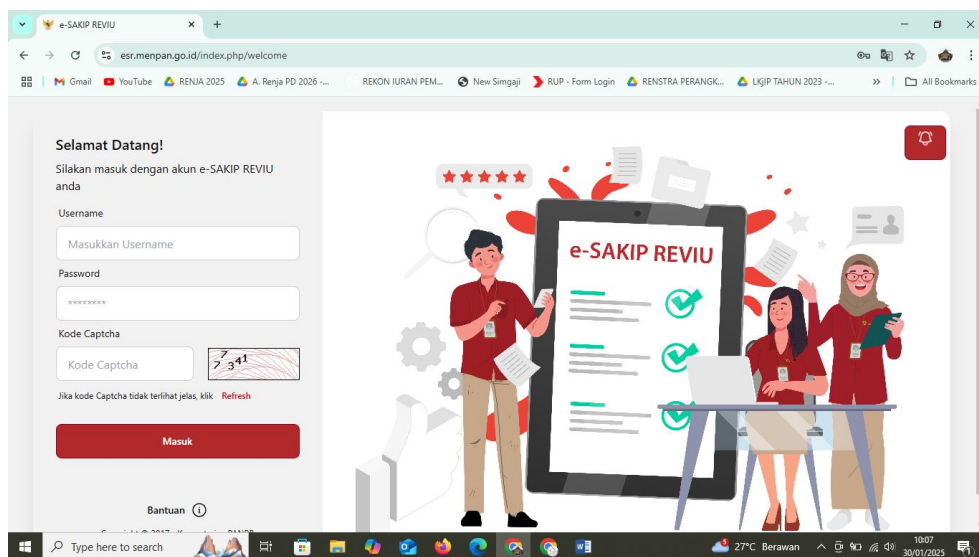
Aplikasi Evaluation System Reform (ESR) merupakan platform digital yang dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendukung pemantauan, evaluasi, dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Aplikasi ini digunakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan secara terukur, efektif, efisien, dan selaras dengan indikator serta kebijakan yang telah ditetapkan.

Melalui pemanfaatan aplikasi ESR, Kementerian PANRB dapat melakukan pemantauan secara komprehensif terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan sumber daya. Aplikasi ini menjadi sarana dalam pengelolaan data reformasi birokrasi yang mencakup pengisian penilaian mandiri, pengelolaan dan validasi data kinerja, pelaksanaan evaluasi, serta tindak lanjut perbaikan secara berkelanjutan, termasuk pengembangan inovasi pelayanan publik.

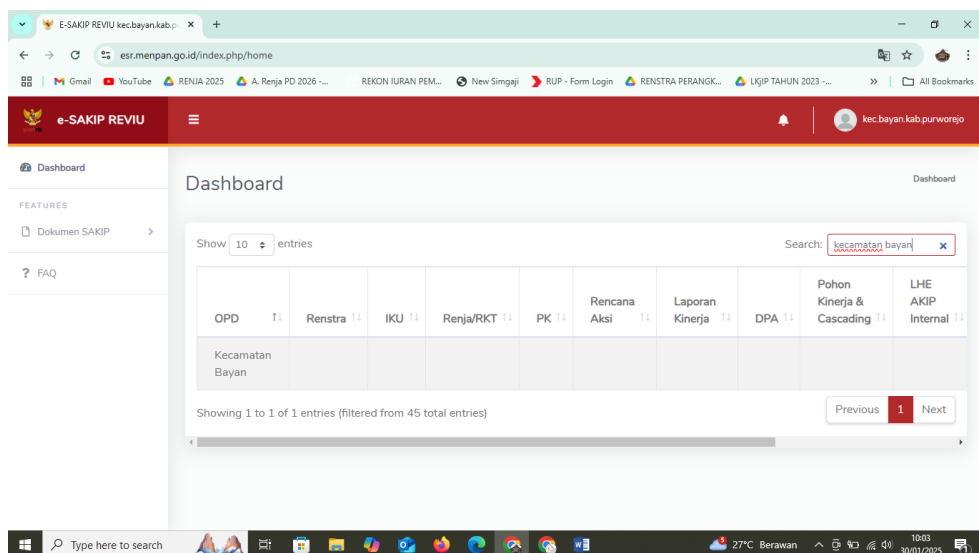
Perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kelengkapan, akurasi, dan ketepatan waktu pengisian data pada aplikasi ESR, serta menjamin pelaksanaan reformasi birokrasi yang akuntabel, transparan, dan konsisten dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Keberhasilan pemanfaatan aplikasi ESR sangat bergantung pada komitmen pimpinan, keterlibatan aktif seluruh aparatur, kualitas data yang

disajikan, serta sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan Kementerian PANRB.

Pada saat ini, pemanfaatan seluruh menu dalam aplikasi ESR belum sepenuhnya dilaksanakan. Namun demikian, upaya optimalisasi pemanfaatan aplikasi ESR akan terus ditingkatkan secara bertahap pada setiap tahun guna mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Kecamatan Purwodadi.



Gambar 2.5 Halaman *Login* Aplikasi ESR MENPAN



Gambar 2.6 Tampilan Aplikasi ESR MENPAN

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 3.2 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formula
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1) Persyaratan, 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian, 4) Biaya/Tarif, 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, serta 9) Sarana dan Prasarana, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun yang tertentu	Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1) Persyaratan, 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian, 4) Biaya/ Tarif , 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, serta 9) Sarana dan Prasarana, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun yang tertentu

Tabel 3.3 Target dan Realisasi

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) perangkat Daerah	91,94	92,00	91,33	99,27%

Berdasarkan Tabel 3.3, dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang hampir mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 92,00, realisasi capaian mencapai 91,33 dengan persentase capaian sebesar 99,27 persen. Capaian tersebut termasuk dalam kategori kinerja sangat baik, meskipun masih terdapat selisih kecil terhadap target yang ditetapkan.

Capaian kinerja ini diperoleh dari akumulasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester I dan Semester II Kecamatan Purwodadi Tahun 2025. Hasil tersebut mencerminkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat telah berjalan secara optimal dan konsisten, serta menunjukkan komitmen perangkat daerah dalam menjaga dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Purwodadi didukung oleh enam program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun capaian kinerja program dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut;

Tabel 3.4 Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500.000	500.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	125.000	-	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	125.000	-	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	125.000	-	0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	125.000	-	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	250.000	250.000	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000	250.000	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.666.948.874	1.619.451.777	97,15
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.000.000	125.000	12,50

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	750.000	750.000	100
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	625.000	405.000	64,80
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.750.000	1.500.000	85,71
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.509.000	3.509.000	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3.442.000	3.442.000	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18.478.800	18.475.800	99,98
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8.983.600	8.983.400	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.332.000	1.320.000	99,1
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	17.207.700	17.207.700	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.203.300	10.202.000	99,99
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250.000	250.000	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19.904.500	19.580.400	98,37
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48.919.200	38.835.017	79,39
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	82.614.000	82.265.413	99,58
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	38.220.000	38.219.087	100

	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10.540.000	10.540.000	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5.030.000	5.030.000	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15.833.000	15.810.676	99,86
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.440.000	2.440.000	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.925.000	2.925.000	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.650.000	2.650.000	100
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4.325.000	4.325.000	100
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.650.000	2.650.000	100
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-	-	0
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	405.000	405.000	100

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21.463.000	21.463.000	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	69.801.000	69.801.000	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.190.000	3.190.000	100
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.101.000	7.101.000	100
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3.710.000	3.710.000	100
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13.340.000	13.340.000	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.385.000	2.385.000	100
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.985.000	3.985.000	100

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.120.000	2.120.000	100
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.750.000	20.750.000	100
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.240.000	4.240.000	100
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	-	0
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.200.000	1.200.000	100
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.590.000	1.590.000	100
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1.325.000	1.325.000	100

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target				Realisasi				Target Akhir RPJMD	Target Akhir RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2025	= (realisasi 25/target akhir RPJMD)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	87,70	88,00	88,30	88,50	92,00	85,20	91,69	91,94	91,33	92,00	91,33/92,00 = 0.99

Capaian kinerja Kecamatan Purwodadi pada Tahun 2025 menunjukkan tren yang positif apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya maupun beberapa tahun terakhir. Indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan secara konsisten sebagai hasil dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2025 mengalami peningkatan, yang mencerminkan adanya perbaikan kualitas pelayanan, peningkatan responsivitas aparatur, serta optimalisasi proses pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan telah berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Tahun 2021–2026, realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan untuk periode berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Purwodadi berada pada jalur yang sesuai bahkan melebihi perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan Kecamatan Purwodadi dalam mengimplementasikan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik secara konsisten dan terarah. Meskipun demikian, upaya peningkatan kualitas pelayanan akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (SPM);

Realisasi kinerja Kecamatan Purwodadi pada Tahun 2024, khususnya pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, telah dibandingkan dengan standar nasional yang berlaku sebagai tolok ukur kualitas pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pedoman penyusunan dan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Purwodadi berada di atas standar minimal nasional yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan telah memenuhi bahkan melampaui standar pelayanan yang dipersyaratkan secara nasional.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan, baik dari aspek prosedur, waktu layanan, kompetensi aparatur, maupun sarana dan prasarana pendukung, telah berjalan secara efektif. Meskipun demikian, Kecamatan Purwodadi tetap berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan inovasi pelayanan secara berkelanjutan guna menjaga kesesuaian dengan standar nasional serta menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan harapan masyarakat.

3.1.4 Analisis Penyebab Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi

Pencapaian kinerja Kecamatan Purwodadi pada Tahun 2024, khususnya pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, menunjukkan hasil yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain meningkatnya komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, perbaikan prosedur pelayanan yang lebih sederhana dan jelas, serta pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan yang semakin memadai.

Selain itu, penerapan sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan. Koordinasi yang baik antarunit kerja juga mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan publik.

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang positif, masih terdapat beberapa kendala yang berpotensi memengaruhi kinerja, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dalam hal jumlah dan kompetensi aparatur pada bidang pelayanan tertentu, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan kecepatan pelayanan. Kondisi tersebut memerlukan perhatian dan penanganan secara berkelanjutan agar tidak berdampak pada penurunan kinerja di masa mendatang.

Sebagai alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan, Kecamatan Purwodadi melaksanakan upaya peningkatan kapasitas aparatur melalui pembinaan dan pelatihan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, serta penyempurnaan standar operasional prosedur pelayanan. Selain itu, penguatan mekanisme pengaduan dan partisipasi masyarakat terus ditingkatkan sebagai sarana untuk memperoleh masukan dan umpan balik dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (Anggaran)

Penggunaan sumber daya anggaran Kecamatan Purwodadi pada Tahun 2025 telah dilaksanakan secara optimal dan berorientasi pada pencapaian hasil kinerja. Alokasi anggaran difokuskan pada program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis, khususnya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Realisasi anggaran menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, ditandai dengan tercapainya kinerja yang melampaui target meskipun penggunaan anggaran tetap berada dalam batas yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan mengutamakan prinsip value for money, yaitu keseimbangan antara input, proses, dan output yang dihasilkan.

Efisiensi penggunaan anggaran juga didukung oleh perencanaan yang matang, pengendalian pelaksanaan kegiatan secara berkala, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Koordinasi yang baik antarunit kerja turut berperan dalam mencegah terjadinya duplikasi kegiatan dan memastikan anggaran digunakan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, upaya peningkatan efisiensi penggunaan anggaran akan terus dilakukan melalui penyempurnaan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, diharapkan pemanfaatan anggaran pada tahun-tahun berikutnya dapat semakin optimal dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian kinerja Kecamatan Purwodadi pada Tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Program dan kegiatan tersebut direncanakan dan dilaksanakan secara terintegrasi dengan mengacu pada tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berperan dalam memastikan tersedianya dukungan administratif, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya yang memadai, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dapat berjalan secara optimal. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik menjadi program utama yang secara langsung mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui perbaikan prosedur, peningkatan kompetensi aparatur, serta penyediaan sarana dan prasarana pelayanan.

Selain itu, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan turut berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat sinergi antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa dan kelurahan. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi penyelenggaraan pelayanan publik. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa berperan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, yang secara tidak langsung berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Meskipun secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan telah mendukung pencapaian kinerja, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kebutuhan penyesuaian terhadap dinamika regulasi dan kebutuhan masyarakat. Kendala tersebut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun berikutnya agar pencapaian kinerja dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500.000	500.000	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	125.000	-	0
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	125.000	-	0
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	125.000	-	0
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	125.000	-	0
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	250.000	250.000	100
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000	250.000	100
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.666.948.874	1.619.451.777	97,15
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	0
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.000.000	125.000	12,50
11	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	750.000	750.000	100
12	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	625.000	405.000	64,80
13	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.750.000	1.500.000	85,71
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.509.000	3.509.000	100
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.442.000	3.442.000	100
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.478.800	18.475.800	99,98
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	8.983.600	8.983.400	100
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.332.000	1.320.000	99,10
19	Penyediaan Bahan/Material	17.207.700	17.207.700	100
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	0

21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.203.300	10.202.000	99,99
22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250.000	250.000	100
23	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.904.500	19.580.400	98,37
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.919.200	38.835.017	79,39
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.614.000	82.265.413	99,58
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.220.000	38.219.087	100
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.540.000	10.540.000	100
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.030.000	5.030.000	100
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.833.000	15.810.676	99,86
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.440.000	2.440.000	100
31	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.925.000	2.925.000	100
32	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.650.000	2.650.000	100
33	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4.325.000	4.325.000	100
34	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.650.000	2.650.000	100
35	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	0
36	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	405.000	405.000	100
37	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21.463.000	21.463.000	100

38	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	69.801.000	69.801.000	100
39	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.190.000	3.190.000	100
40	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.101.000	7.101.000	100
41	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	0
42	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3.710.000	3.710.000	100
43	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13.340.000	13.340.000	100
44	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.385.000	2.385.000	100
45	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.985.000	3.985.000	100
46	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.120.000	2.120.000	100
47	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.750.000	20.750.000	100
48	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.240.000	4.240.000	100
49	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	-	0
50	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.200.000	1.200.000	100
51	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.590.000	1.590.000	100
52	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1.325.000	1.325.000	100
JUMLAH		2.128.635.974	2.068.497.270	97,17

3.3 Inovasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, Kecamatan Purwodadi terus mendorong penerapan inovasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Inovasi yang dikembangkan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta responsivitas pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan penyederhanaan proses kerja.

Pelaksanaan inovasi difokuskan pada penguatan sistem pelayanan, peningkatan koordinasi antarunit kerja, serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi pendukung kinerja dan pelayanan. Inovasi tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan, meningkatkan transparansi, serta mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur.

Meskipun inovasi yang dilaksanakan masih bersifat penguatan dan pengembangan dari sistem yang telah ada, Kecamatan Purwodadi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan cakupan inovasi secara bertahap. Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong partisipasi aparatur, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta menyesuaikan inovasi dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat di wilayah Kecamatan Purwodadi.

3.4 Penghargaan

Sebagai hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan, Kecamatan Purwodadi pada Tahun 2024 telah memperoleh apresiasi dan pengakuan atas kinerja yang dilaksanakan. Penghargaan yang diterima merupakan bentuk pengakuan terhadap komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta akuntabilitas kinerja.

Penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Kecamatan Purwodadi untuk terus meningkatkan kinerja dan mempertahankan kualitas pelayanan yang telah dicapai. Selain itu, capaian ini juga mendorong seluruh aparatur untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Apabila pada Tahun 2024 belum terdapat penghargaan yang diperoleh secara formal, maka pelaksanaan kinerja dan inovasi yang telah dilakukan tetap menjadi modal penting dalam upaya peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum, pelaksanaan kinerja Kecamatan Purwodadi pada Tahun 2024 telah berjalan dengan baik dan menunjukkan hasil yang positif. Capaian kinerja yang dihasilkan mencerminkan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan telah tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kinerja telah dilaksanakan secara terarah dan konsisten. Capaian tersebut didukung oleh sinergi antarunit kerja, komitmen aparatur, serta pemanfaatan instrumen pendukung kinerja secara optimal.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus ditingkatkan, terutama dalam hal penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi kinerja. Aspek-aspek tersebut menjadi perhatian dalam rangka menjaga kesinambungan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada tahun-tahun mendatang, Kecamatan Purwodadi telah menetapkan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Rencana tindak lanjut tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penguatan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain peningkatan kompetensi aparatur melalui pembinaan dan pelatihan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan dan pelaporan kinerja, serta penguatan koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah terkait, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, Kecamatan Purwodadi akan terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta memanfaatkan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar perbaikan dan pengambilan kebijakan. Dengan pelaksanaan rencana tindak lanjut yang terarah dan konsisten, diharapkan kinerja Kecamatan Purwodadi pada periode berikutnya dapat semakin meningkat dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.

LAMPIRAN

1. Daftar referensi
2. SK Tim Penyusun LKjIP 2025
3. SK Penetapan LKjIP
4. PK PD Murni dan Perubahan
5. Laporan realisasi anggaran per program, Kegiatan, Sub Kegiatan PD
6. SK IKU PD
7. Hasil SKM Tahun 2025
8. Hasil realisasi fisik dan keuangan program, kegiatan, subkegiatan
9. Penghargaan dan dokumentasi penghargaan yang diterima PD



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN PURWODADI

Jalan Panembahan Senopati Km.02 Desa Jenarwetan Kec. Purwodadi, Purworejo Jawa Tengah 54173

Telepon (0275) 756002, Faksimile (0275) 756002

Laman kec-purwodadi.purworejo.go.id, Pos-el : kec-purwodadi@purworejo.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PURWODADI NOMOR : 000.8.6.3 / 49 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025

CAMAT PURWODADI

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025, maka berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Purwodadi selaku Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.
 - b. bahwa demi kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Purwodadi Tahun 2025 perlu dibentuk Tim Penyusun.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Pembentukan Tim perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Purwodadi tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Purwodadi Tahun 2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14 Seri E Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4 Seri D Nomor 1)
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Purworejo
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 5 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5/2025);
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 23 Seri A Nomor 3).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kecamatan Purwodadi
Nomor : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.03.0000/001/2025
Tanggal : 12 Agustus 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA :** Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kecamatan Purwodadi Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA adalah :
- a. Melaksanakan perumusan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Purwodadi Tahun 2025;
 - b. Melaporkan hasil penyusunan LKjIP tersebut kepada Camat Purwodadi;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 20 Januari 2026

CAMAT PURWODADI



Sumarjana, S.Sos.

Pembina Tk I / IVb

NIP. 19690612 199001 1 001

LAMPIRAN : Surat Keputusan Camat Purwodadi
Nomor : 000.8.6.3 / 49 / 2025
Tanggal : 20 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Camat Purwodadi	Penanggung jawab
2	Sekretaris Camat	Ketua
3	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4	Pengadministrasi Keuangan	Anggota
5	Pranata Komputer Terampil	Anggota



CAMAT PURWODADI

Sumarjana, S.Sos.
Pembina Tk I / IVb

NIP. 19690612 199001 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN PURWODADI**

Jalan Panembahan Senopati Km.02 Desa Jenarwetan Kec. Purwodadi, Purworejo Jawa Tengah 54173
Telepon (0275) 756002, Faksimile (0275) 756002
Laman kec-purwodadi.purworejo.go.id, Pos-el : kec-purwodadi@purworejo.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMARJANA, S. SOS
Jabatan : Camat Purwodadi Kabupaten Purworejo
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YULI HASTUTI
Jabatan : Bupati Purworejo
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 3 Januari 2025

Pihak Kedua
BUPATI PURWOREJO

YULI HASTUTI

Pihak Pertama
CAMAT PURWODADI

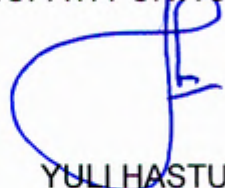
SUMARJANA, S. Sos
Pembina Tk. I / IV B
NIP. 19690612 199001 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN PURWOREJO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	92,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.189.223.740	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 49.202.000	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 153.833.000	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 32.876.000	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 33.320.000	APBD
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 84.573.000	APBD
Jumlah		Rp 2.543.027.740	

BUPATI PURWOREJO



YULI HASTUTI

CAMAT PURWODADI



SUMARJANA, S. Sos
Pembina Tk. I / IV B
NIP. 19690612 199001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN PURWODADI

Jalan Panembahan Senopati Km.02 Desa Jenarwetan Kec. Purwodadi, Purworejo Jawa Tengah 54173
Telepon (0275) 756002, Faksimile (0275) 756002
Laman kec-purwodadi.purworejo.go.id, Pos-el : kec-purwodadi@purworejo.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VENY YUDHA APRIYANI, S.STP., M.H

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Purwodadi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUMARJANA, S. SOS

Jabatan : Camat Purwodadi

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 3 Januari 2025

Pihak Kedua
CAMAT PURWODADI

SUMARJANA, S. SOS

Pembina Tk. I / IV B

NIP. 19690612 199001 1 001

Pihak Pertama
SEKRETARIS KECAMATAN PURWODADI

VENY YUDHA APRIYANI, S.STP., M.H.

Pembina / IV A

NIP. 19860418 200412 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN PURWODADI

Jalan Panembahan Senopati Km.02 Desa Jenarwetan Kec. Purwodadi, Purworejo Jawa Tengah 54173
Telepon (0275) 756002, Faksimile (0275) 756002
Laman kec-purwodadi.purworejo.go.id, Pos-el : kec-purwodadi@purworejo.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SEMI
Jabatan : Plt. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : VENY YUDHA APRIYANI, S.STP., M.H.
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Purwodadi
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
SEKRETARIS KECAMATAN PURWODADI

VENY YUDHA APRIYANI, S.STP., M.H.

Pembina / IV A
NIP. 19860418 200412 2 001

Purworejo, 3 Januari 2025
Pihak Pertama
Plt. KASUBAG PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

SEMI

Penata Muda Tk. I / III b
NIP. 19690102 199003 2 007

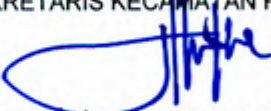
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN
1	2		4	5
1	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPA-SKPD	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan
2	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20 Orang/Bulan
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6 Laporan
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan

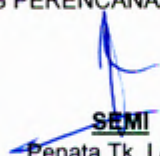
NO	KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 1.400.000,00	DAU
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 750.000,00	DAU

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp	750.000,00	DAU
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp	1.050.000,00	DAU
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp	750.000,00	DAU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	750.000,00	DAU
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	750.000,00	DAU
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	1.820.653.780,00	PAD, DAU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	250.000,00	DAU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp	1.100.000,00	DAU
			Rp	1.828.203.780,00	

Pihak Kedua
SEKRETARIS KECAMATAN PURWODADI


VENY YUDHA APRIYANI, S.STP., M.H.
Pembina / IV A
NIP. 19860418 200412 2 001

Purworejo, 3 Januari 2025
Pihak Pertama
Pit. KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN


SEMI
Penata Tk. I / III D
NIP. 1966901021990032007



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN PURWODADI

Jalan Panembahan Senopati Km.02 Desa Jenarwetan Kec. Purwodadi, Purworejo Jawa Tengah 54173
Telepon (0275) 756002, Faksimile (0275) 756002
Laman kec-purwodadi.purworejo.go.id, Pos-el : kec-purwodadi@purworejo.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SULISTYORINI, SIP
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : VENY YUDHA APRIYANI, S.STP., M.H.
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Purwodadi
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
SEKRETARIS KECAMATAN PURWODADI

VENY YUDHA APRIYANI, S.STP., M.H.

Pembina / IV A
NIP. 19860418 200412 2 001

Purworejo, 3 Januari 2025
Pihak Pertama
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SULISTYORINI, SIP
Penata Tk. I / III D
NIP. 196710211994032005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlayannya Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
2	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlayannya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Laporan
3	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlayannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen
4	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen
5	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36 Unit
6	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan

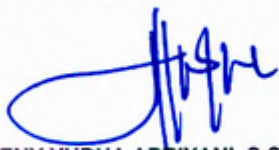
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan
7	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 Unit
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 Unit
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Unit
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Unit

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 750.000,00	DAU
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 925.000,00	DAU
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 5.875.000,00	DAU
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3.514.500,00	DAU
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 5.293.500,00	DAU
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 19.068.000,00	DAU
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 16.076.000,00	DAU
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 1.332.000,00	DAU
		Penyediaan Bahan/Material	Rp 17.971.500,00	DAU
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 495.000,00	DAU
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 21.476.560,00	DAU
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 1.555.000,00	DAU

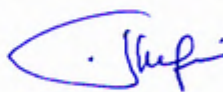
NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Rp 26.588.100,00	DAU
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 55.001.800,00	DAU
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 79.338.000,00	DAU
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 38.220.000,00	DAU
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 27.650.000,00	DAU
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 6.410.000,00	DAU
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 31.040.000,00	DAU
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 2.440.000,00	DAU
		Jumlah	Rp 361.019.960,00	

Purworejo, 3 Januari 2025

Pihak Kedua
SEKRETARIS KECAMATAN PURWODADI


VENY YUDHA APRIYANI, S.STP., M.H.
Pembina / IV A
NIP. 19860418 200412 2 001

Pihak Pertama
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN


SULISTYORINI, SIP
Penata Tk. I / III D
NIP. 196710211994032005



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN PURWODADI

Jalan Panembahan Senopati Km.02 Desa Jenarwetan Kec. Purwodadi, Purworejo Jawa Tengah 54173
Telepon (0275) 756002, Faksimile (0275) 756002
Laman kec-purwodadi.purworejo.go.id, Pos-el : kec-purwodadi@purworejo.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRI ASTUTI, S.IP

Jabatan : Kasi Pembangunan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUMARJANA, S. SOS

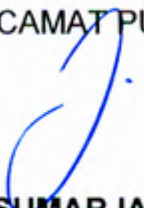
Jabatan : Camat Purwodadi

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

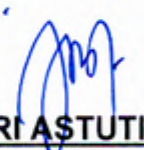
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
CAMAT PURWODADI


SUMARJANA, S. SOS
Pembina Tk. I / IV B
NIP. 19690612 199001 1 00

Purworejo, 3 Januari 2025
Pihak Pertama
KASI PEMBANGUNAN


INDRI ASTUTI, S.IP
Penata Tk. I / III D
NIP. 19780317 199803 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Laporan
2	Hasil Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Dokumen
3	Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Laporan
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Laporan

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rp 26.075.000,00	DAU
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 6.830.000,00	DAU
2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Rp 1.850.000,00	DAU

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Rp 1.375.000,00	DAU
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp 4.010.000,00	DAU
		Jumlah	Rp 40.140.000,00	

Purworejo, 3 Januari 2025

Pihak Kedua
CAMAT PURWODADI

Pihak Pertama
KASI PEMBANGUNAN

SUMARJANA, S.Sos.
Pembina Tk I / IV B
NIP. 19690612 199001 1 001

INDRI ASTUTI, S.IP
Penata Tk. I / III D
NIP. 19780317 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN PURWODADI

Jalan Panembahan Senopati Km.02 Desa Jenarwetan Kec. Purwodadi, Purworejo Jawa Tengah 54173
Telepon (0275) 756002, Faksimile (0275) 756002
Laman kec-purwodadi.purworejo.go.id, Pos-el : kec-purwodadi@purworejo.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SISWANTORO, S.E.
Jabatan : Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : SUMARJANA, S. SOS
Jabatan : Camat Purwodadi

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
CAMAT PURWODADI


SUMARJANA, S. SOS
Pembina Tk. I / IV B
NIP. 19690612 199001 1 00

Purworejo, 3 Januari 2025
Pihak Pertama
KASI PEMERINTAHAN UMUM,
KETENTRAMAN dan KETERTIBAN UMUM


AGUS SISWANTORO, S.E.
Penata Tk. I / III D
NIP. 19680817 199003 1 015

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan
2	Hasil Pelaksanaan Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan
3	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Hasil Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Kegiatan
		Hasil Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Dokumen

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Rp 17.385.000,00	DAU
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 13.742.000,00	DAU


2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	Rp	1.749.000,00	DAU
3	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Rp	6.260.000,00	DAU
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp	27.060.000,00	DAU
		Jumlah	Rp	66.196.000,00	

Pihak Kedua
CAMAT PURWODADI


SUMARJANA, S.Sos.
Pembina Tk I / IV B
NIP. 19690612 199001 1 001

Purworejo, 3 Januari 2025
Pihak Pertama

**KASI PEMERINTAHAN UMUM, KETENTRAMAN
dan KETERTIBAN UMUM**


AGUS SISWANTORO, S.E.
Penata Tk. I / III D
NIP. 19680817 199003 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN PURWODADI

Jalan Panembahan Senopati Km.02 Desa Jenarwetan Kec. Purwodadi, Purworejo Jawa Tengah 54173
Telepon (0275) 756002, Faksimile (0275) 756002
Laman kec-purwodadi.purworejo.go.id, Pos-el : kec-purwodadi@purworejo.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARMIYATI, S.Sos.
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUMARJANA, S. SOS
Jabatan : Camat Purwodadi
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
CAMAT PURWODADI

SUMARJANA, S. SOS
Pembina Tk. I / IV B
NIP. 19690612 199001 1 00

Purworejo, 3 Januari 2025
Pihak Pertama
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DARMIYATI, S.Sos.
Penata Tk. I / III D
NIP. 19671026 1993032 00 3

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	Hasil Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen
2	Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5 Lembaga
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp 4.950.000,00	DAU
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 4.112.000,00	DAU
2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 21.463.000,00	DAU

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 132.370.000,00	DAU
		Jumlah	Rp 153.833.000,00	

Pihak Kedua
CAMAT PURWODADI

SUMARJANA, S.Sos.
Pembina Tk I / IV B
NIP. 19690612 199001 1 001

Purworejo, 2 Januari 2024
Pihak Pertama
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DARMIYATI, S.Sos.
Penata Tk. I / III D
NIP. 19671026 199303 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN PURWODADI

Jalan Panembahan Senopati Km.02 Desa Jenarwetan Kec. Purwodadi, Purworejo Jawa Tengah 54173
Telepon (0275) 756002, Faksimile (0275) 756002
Laman kec-purwodadi.purworejo.go.id, Pos-el : kec-purwodadi@purworejo.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYUNINGSIH, S.E
Jabatan : Kasi Pemerintahan Desa
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUMARJANA, S. SOS
Jabatan : Camat Purwodadi

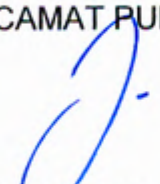
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

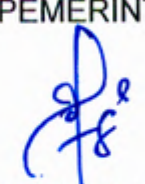
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 3 Januari 2025

Pihak Kedua
CAMAT PURWODADI


SUMARJANA, S. SOS
Pembina Tk. I / IV B
NIP. 19690612 199001 1 001

Pihak Pertama
KASI PEMERINTAHAN DESA


WAHYUNINGSIH, S.E.
Penata Tk. I / III D
NIP. 19711226 199503 2 002

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
1	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Rp 4.950.000,00	DAU
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp 7.370.000,00	DAU
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Rp 6.485.000,00	DAU
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 43.760.000,00	DAU
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Rp 9.880.000,00	DAU
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp 1.700.000,00	DAU
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp 4.155.000,00	DAU
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Rp 3.285.000,00	DAU
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Rp 2.988.000,00	DAU
		Jumlah	Rp 84.573.000,00	

Pihak Kedua
CAMAT PURWODADI

SUMARJANA, S.Sos.
Pembina Tk I / IV B
NIP. 19690612 199001 1 001

Purworejo, 3 Januari 2025
Pihak Pertama
KASI PEMERINTAHAN DESA

WAHYUNINGSIH, S.E.
Penata Tk. I / III D
NIP. 19711226 199503 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN PURWODADI

Jalan Panembahan Senopati Km.02 Desa Jenarwetan Kec. Purwodadi, Purworejo Jawa Tengah 54173
Telepon (0275) 756002, Faksimile (0275) 756002
Laman kec-purwodadi.purworejo.go.id, Pos-el kec-purwodadi@purworejo.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMARJANA, S. SOS
Jabatan : Camat Purwodadi Kabupaten Purworejo
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

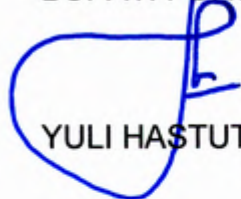
Nama : YULI HASTUTI
Jabatan : Bupati Purworejo
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

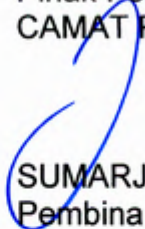
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 13 Agustus 2025

Pihak Kedua
BUPATI PURWOREJO


YULI HASTUTI

Pihak Pertama
CAMAT PURWODADI


SUMARJANA, S. Sos
Pembina Tk. I / IV B
NIP. 19690612 199001 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN PURWOREJO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	92,00

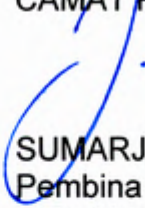
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.115.232.267	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 12.955.000	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 91.264.000	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 10.291.000	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 17.050.000	APBD
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 37.595.000	APBD
	Jumlah	Rp 2.284.387.267	

Purworejo, 13 Agustus 2025

Pihak Kedua
BUPATI PURWOREJO


YULI HASTUTI

Pihak Pertama
CAMAT PURWODADI


SUMARJANA, S. Sos
Pembina Tk. I / IV B
NIP. 19690612 199001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN PURWODADI

Jalan Panembahan Senopati Km.02 Desa Jenarwetan Kec. Purwodadi, Purworejo Jawa Tengah 54173
Telepon (0275) 756002, Faksimile (0275) 756002
Laman kec-purwodadi.purworejo.go.id, Pos-el kec-purwodadi@purworejo.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VENY YUDHA APRIYANI, S.STP., M.H

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Purwodadi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUMARJANA, S. SOS

Jabatan : Camat Purwodadi

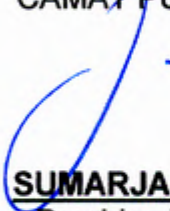
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purworejo, 13 Agustus 2025

Pihak Kedua
CAMAT PURWODADI


SUMARJANA, S. SOS
Pembina Tk. I / IV B
NIP. 19690612 199001 1 001

Pihak Pertama
SEKRETARIS KECAMATAN PURWODADI


VENY YUDHA APRIYANI, S.STP., M.H.
Pembina / IV A
NIP. 19860418 200412 2 001


LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIS KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN PURWOREJO

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%


NO	PROGRAM	ANGGARAN	
1	2	3	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	2.115.232.267
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp	12.955.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp	91.264.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp	10.291.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp	17.050.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp	37.595.000
Jumlah		Rp	2.284.387.267

Purworejo, 13 Agustus 2025

Pihak Kedua
CAMAT PURWODADI


SUMARJANA, S.Sos.
 Pembina Tk I / IV B
 NIP. 19690612 199001 1 001

Pihak Pertama
SEKRETARIS KECAMATAN PURWODADI


VENY YUDHA APRIYANI, S.STP., M.H.
 Pembina / IV A
 NIP. 19860418 200412 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN PURWODADI

Jalan Panembahan Senopati Km.02 Desa Jenarwetan Kec. Purwodadi, Purworejo Jawa Tengah 54173
Telepon (0275) 756002, Faksimile (0275) 756002
Laman kec-purwodadi.purworejo.go.id, Pos-el kec-purwodadi@purworejo.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRI ASTUTI, S.IP

Jabatan : Kasi Pembangunan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUMARJANA, S. SOS

Jabatan : Camat Purwodadi

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
CAMAT PURWODADI

SUMARJANA, S. SOS
Pembina Tk. I / IV B
NIP. 19690612 199001 1 00

Purworejo, 13 Agustus 2025
Pihak Pertama
KASI PEMBANGUNAN

INDRI ASTUTI, S.IP
Penata Tk. I / III D
NIP. 19780317 199803 2 001


LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Laporan
2	Hasil Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	0 Dokumen
3	Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	0 Laporan
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Laporan


NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rp 4.325.000,00	DAU
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 2.650.000,00	DAU
2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Rp -	DAU

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Rp -	DAU
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp 405.000,00	DAU
		Jumlah	Rp 7.380.000,00	

Pihak Kedua
CAMAT PURWODADI


SUMARJANA, S.Sos.
Pembina Tk I / IV B
NIP. 19690612 199001 1 001

Purworejo, 13 Agustus 2025
Pihak Pertama
KASI PEMBANGUNAN


INDRI ASTUTI, S.IP
Penata Tk. I / III D
NIP. 19780317 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN PURWODADI

Jalan Panembahan Senopati Km.02 Desa Jenarwetan Kec. Purwodadi, Purworejo Jawa Tengah 54173
Telepon (0275) 756002, Faksimile (0275) 756002
Laman kec-purwodadi.purworejo.go.id, Pos-el kec-purwodadi@purworejo.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARMIYATI, S.Sos.
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : SUMARJANA, S. SOS
Jabatan : Camat Purwodadi

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

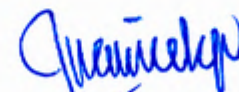
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
CAMAT PURWODADI


SUMARJANA, S. SOS
Pembina Tk. I / IV B
NIP. 19690612 199001 1 00

Purworejo, 13 Agustus 2025
Pihak Pertama
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


DARMIYATI, S.Sos.
Penata Tk. I / III D
NIP. 19671026 1993032 00 3


**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	Hasil Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen
2	Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5 Lembaga
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp 2.925.000,00	DAU
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 2.650.000,00	DAU
2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 21.463.000,00	DAU


NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 69.801.000,00	DAU
		Jumlah	Rp 91.264.000,00	

Pihak Kedua
CAMAT PURWODADI



SUMARJANA, S.Sos.
Pembina Tk I / IV B
NIP. 19690612 199001 1 001

Purworejo, 13 Agustus 2025
Pihak Pertama
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



DARMIYATI, S.Sos.
Penata Tk. I / III D
NIP. 19671026 199303 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN PURWODADI

Jalan Panembahan Senopati Km.02 Desa Jenarwetan Kec. Purwodadi, Purworejo Jawa Tengah 54173
Telepon (0275) 756002, Faksimile (0275) 756002
Laman kec-purwodadi.purworejo.go.id, Pos-el kec-purwodadi@purworejo.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SISWANTORO, S.E.
Jabatan : Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : SUMARJANA, S. SOS
Jabatan : Camat Purwodadi

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
CAMAT PURWODADI


SUMARJANA, S. SOS
Pembina Tk. I / IV B
NIP. 19690612 199001 1 00

Purworejo, 13 Agustus 2025
Pihak Pertama
KASI PEMERINTAHAN UMUM,
KETENTRAMAN dan KETERTIBAN UMUM


AGUS SISWANTORO, S.E.
Penata Tk. I / III D
NIP. 19680817 199003 1 015


LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan
2	Hasil Pelaksanaan Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	Tersusunnya Dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0 Laporan
3	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Hasil Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Kegiatan
		Hasil Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Dokumen

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Rp 3.190.000,00	DAU
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 7.101.000,00	DAU


2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	Rp	-	DAU
3	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Rp	3.710.000,00	DAU
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp	13.340.000,00	DAU
		Jumlah	Rp	27.341.000,00	

Pihak Kedua
CAMAT PURWODADI


SUMARJANA, S.Sos.
Pembina Tk I / IV B
NIP. 19690612 199001 1 001

Purworejo, 13 Agustus 2025
Pihak Pertama

**KASI PEMERINTAHAN UMUM, KETENTRAMAN
dan KETERTIBAN UMUM**


AGUS SISWANTORO, S.E.
Penata Tk. I / III D
NIP. 19680817 199003 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN PURWODADI

Jalan Panembahan Senopati Km.02 Desa Jenarwetan Kec. Purwodadi, Purworejo Jawa Tengah 54173
Telepon (0275) 756002, Faksimile (0275) 756002
Laman kec-purwodadi.purworejo.go.id, Pos-el kec-purwodadi@purworejo.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYUNINGSIH, S.E
Jabatan : Kasi Pemerintahan Desa
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SUMARJANA, S. SOS
Jabatan : Camat Purwodadi
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
CAMAT PURWODADI


SUMARJANA, S. SOS
Pembina Tk. I / IV B
NIP. 19690612 199001 1 001

Purworejo, 13 Agustus 2025
Pihak Pertama
KASI PEMERINTAHAN DESA



WAHYUNINGSIH, S.E.
Penata Tk. I / III D
NIP. 19711226 199503 2 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO


NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	Hasil Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0 Dokumen
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Dokumen

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
1	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Rp 2.385.000,00	DAU
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp 3.985.000,00	DAU
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Rp 2.120.000,00	DAU
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 20.750.000,00	DAU
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Rp 4.240.000,00	DAU
		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp -	DAU
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp 1.200.000,00	DAU
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Rp 1.590.000,00	DAU
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Rp 1.325.000,00	DAU
		Jumlah	Rp 37.595.000,00	

Pihak Kedua
CAMAT PURWODADI


SUMARJANA, S.Sos.
Pembina Tk I / IV B
NIP. 19690612 199001 1 001

Purworejo, 13 Agustus 2025
Pihak Pertama
KASI PEMERINTAHAN DESA


WAHYUNINGSIH, S.E.
Penata Tk. I / III D
NIP. 19711226 199503 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN PURWODADI

Jalan Panembahan Senopati Km.02 Desa Jenarwetan Kec. Purwodadi, Purworejo Jawa Tengah 54173
Telepon (0275) 756002, Faksimile (0275) 756002
Laman kec-purwodadi.purworejo.go.id, Pos-el kec-purwodadi@purworejo.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SEMI
Jabatan : Plt. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : VENY YUDHA APRIYANI, S.STP., M.H.
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Purwodadi

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
SEKRETARIS KECAMATAN PURWODADI

VENY YUDHA APRIYANI, S.STP., M.H.

Pembina / IV A
NIP. 19860418 200412 2 001

Purworejo, 13 Agustus 2025
Pihak Pertama
Plt. KASUBAG PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

SEMI
Penata Muda Tk. I / III b
NIP. 19690102 199003 2 007

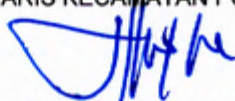
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN
1	2		4	5
1	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPA-SKPD	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan
2	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20 Orang/Bulan
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 Laporan
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 500.000,00	DAU
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 125.000,00	DAU

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp	125.000,00	DAU
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp	125.000,00	DAU
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp	125.000,00	DAU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	250.000,00	DAU
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	250.000,00	DAU
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	1.822.700.167,00	PAD, DAU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	-	DAU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp	1.000.000,00	DAU
			Rp	1.825.200.167,00	

Pihak Kedua
SEKRETARIS KECAMATAN PURWODADI



VENY YUDHA APRIYANI, S.STP., M.H.

Pembina / IV A
NIP. 19860418 200412 2 001

Purworejo, 13 Agustus 2025
Pihak Pertama
Pit. KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN



SEMI

Penata Tk. I / III D
NIP. 1966901021990032007



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN PURWODADI

Jalan Panembahan Senopati Km.02 Desa Jenarwetan Kec. Purwodadi, Purworejo Jawa Tengah 54173
Telepon (0275) 756002, Faksimile (0275) 756002
Laman kec-purwodadi.purworejo.go.id, Pos-el kec-purwodadi@purworejo.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SULISTYORINI, SIP
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : VENY YUDHA APRIYANI, S.STP., M.H.
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Purwodadi
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
SEKRETARIS KECAMATAN PURWODADI

VENY YUDHA APRIYANI, S.STP., M.H.

Pembina / IV A
NIP. 19860418 200412 2 001

Purworejo, 13 Agustus 2025
Pihak Pertama
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SULISTYORINI, SIP
Penata Tk. I / III D
NIP. 196710211994032005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	TARGET KINERJA SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlayannya Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
2	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlayannya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Laporan
3	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlayannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen
4	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Laporan
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen
5	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36 Unit
6	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Rp 26.588.100,00	DAU
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 55.001.800,00	DAU
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 79.338.000,00	DAU
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 38.220.000,00	DAU
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 27.650.000,00	DAU
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 6.410.000,00	DAU
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 31.040.000,00	DAU
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 2.440.000,00	DAU
		Jumlah	Rp 328.719.300,00	

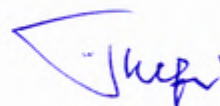
Purworejo, 13 Agustus 2025

Pihak Kedua
SEKRETARIS KECAMATAN PURWODADI

Pihak Pertama
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



VENY YUDHA APRIYANI, S.STP., M.H.
Pembina / IV A
NIP. 19860418 200412 2 001



SULISTYORINI, SIP
Penata Tk. I / III D
NIP. 196710211994032005



PEMERINTAHAN KAB. PURWOREJO
KECAMATAN PURWODADI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	23.110.856,00	23.710.856,00	102,60	39.214.056,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23.110.856,00	23.710.856,00	102,60	39.214.056,00
4.1.02	Retribusi Daerah	23.110.856,00	23.710.856,00	102,60	13.210.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	23.110.856,00	23.710.856,00	102,60	13.210.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	13.210.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	13.210.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	23.110.856,00	23.710.856,00	102,60	0,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	23.110.856,00	23.710.856,00	102,60	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	26.004.056,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	26.004.056,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	0,00	26.004.056,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	0,00	26.004.056,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	23.110.856,00	23.710.856,00	102,60	39.214.056,00
	JUMLAH PENDAPATAN	23.110.856,00	23.710.856,00	102,60	39.214.056,00
5	BELANJA DAERAH	2.128.635.974,00	2.068.497.270,00	97,17	2.543.352.669,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.108.731.474,00	2.048.916.870,00	97,16	2.516.952.669,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.666.948.874,00	1.619.451.777,00	97,15	1.873.454.821,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.104.422.682,00	1.074.143.585,00	97,26	1.267.076.802,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	819.663.914,00	815.714.945,00	99,52	974.280.600,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	779.100.714,00	775.151.745,00	99,49	934.257.400,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	40.563.200,00	40.563.200,00	100,00	40.023.200,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	61.197.362,00	59.627.590,00	97,43	79.507.846,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	57.141.042,00	55.571.270,00	97,25	75.505.526,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.056.320,00	4.056.320,00	100,00	4.002.320,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	70.420.000,00	66.400.000,00	94,29	71.890.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	70.420.000,00	66.400.000,00	94,29	71.890.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	9.940.000,00	9.940.000,00	100,00	9.940.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	4.900.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	5.040.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	13.237.687,00	13.225.000,00	99,90	17.785.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	13.237.687,00	13.225.000,00	99,90	17.785.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	33.416.063,00	32.589.000,00	97,52	44.031.360,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	31.388.303,00	30.561.240,00	97,37	42.003.600,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.027.760,00	2.027.760,00	100,00	2.027.760,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	38.956.697,00	20.496.919,00	52,61	2.606.620,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	38.956.697,00	20.496.919,00	52,61	2.606.620,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	12.398,00	10.437,00	84,18	13.371,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.764,00	9.918,00	84,31	12.729,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	634,00	519,00	81,86	642,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	50.853.139,00	49.620.810,00	97,58	59.052.529,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	48.308.017,00	47.210.806,00	97,73	56.602.285,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.545.122,00	2.410.004,00	94,69	2.450.244,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.682.845,00	1.629.707,00	96,84	1.992.353,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.593.676,00	1.546.079,00	97,01	1.910.021,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	89.169,00	83.628,00	93,79	82.332,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.042.577,00	4.889.177,00	96,96	5.977.123,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.781.079,00	4.638.293,00	97,01	5.730.127,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	261.498,00	250.884,00	95,94	246.996,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	562.526.192,00	545.308.192,00	96,94	606.378.019,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	382.309.203,00	371.541.613,00	97,18	411.424.812,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	367.389.375,00	356.632.442,00	97,07	396.673.443,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	14.919.828,00	14.909.171,00	99,93	14.751.369,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	180.216.989,00	173.766.579,00	96,42	194.953.207,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	172.736.817,00	166.291.750,00	96,27	187.304.576,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	7.480.172,00	7.474.829,00	99,93	7.648.631,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	441.782.600,00	429.465.093,00	97,21	643.497.848,00
5.1.02.01	Belanja Barang	199.143.100,00	199.117.900,00	99,99	319.191.081,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	199.143.100,00	199.117.900,00	99,99	319.191.081,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.464.000,00	3.442.000,00	99,36	53.231.881,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.489.300,00	15.489.300,00	100,00	8.302.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.702.000,00	10.701.800,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	0,00	0,00	254.400,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.509.000,00	3.509.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	147.500.000,00	147.500.000,00	100,00	237.075.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	18.478.800,00	18.475.800,00	99,98	20.327.400,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	158.723.200,00	148.278.430,00	93,42	173.615.374,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	156.255.200,00	146.159.017,00	93,54	160.881.294,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.800.000,00	24.800.000,00	100,00	83.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	68.004.000,00	68.004.000,00	100,00	11.334.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	13.200.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	0,00	0,00	0,00	3.759.600,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	6.829.200,00	4.542.600,00	66,52	5.611.800,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	38.250.000,00	30.532.817,00	79,82	34.843.894,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.332.000,00	1.320.000,00	99,10	1.332.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.840.000,00	3.759.600,00	97,91	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.410.000,00	1.061.413,00	75,28	1.403.280,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.200.000,00	914.592,00	76,22	1.219.456,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	90.000,00	65.256,00	72,51	81.696,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	120.000,00	81.565,00	67,97	102.128,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.058.000,00	1.058.000,00	100,00	11.330.800,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	2.540.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.058.000,00	1.058.000,00	100,00	5.453.600,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	3.337.200,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	72.041.000,00	72.039.763,00	100,00	68.595.393,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	56.230.000,00	56.229.087,00	100,00	37.555.393,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	48.760.000,00	48.759.087,00	100,00	16.855.393,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	11.850.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.440.000,00	2.440.000,00	100,00	2.440.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.650.000,00	3.650.000,00	100,00	3.650.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00	2.760.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.811.000,00	15.810.676,00	100,00	31.040.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.811.000,00	15.810.676,00	100,00	31.040.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.875.300,00	10.029.000,00	84,45	82.096.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.875.300,00	10.029.000,00	84,45	82.096.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.875.300,00	10.029.000,00	84,45	82.096.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.108.731.474,00	2.048.916.870,00	97,16	2.516.952.669,00
5.2	BELANJA MODAL	19.904.500,00	19.580.400,00	98,37	26.400.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.904.500,00	19.580.400,00	98,37	26.400.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	19.904.500,00	19.580.400,00	98,37	26.400.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	19.904.500,00	19.580.400,00	98,37	26.400.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	19.904.500,00	19.580.400,00	98,37	26.400.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	19.904.500,00	19.580.400,00	98,37	26.400.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.128.635.974,00	2.068.497.270,00	97,17	2.543.352.669,00
	SURPLUS/DEFISIT	(2.105.525.118,00)	(2.044.786.414,00)	97,12	(2.504.138.613,00)

Kab. Purworejo, 31 Desember 2025
**KEPALA KECAMATAN
PURWODADI**

SUMARJANA,S.Sos
NIP.196906121990011001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN PURWODADI

Jalan Panembahan Senopati Km.02 Desa Jenarwetan Kec. Purwodadi, Purworejo Jawa Tengah 54173

Telepon (0275) 756002, Faksimile (0275) 756002

Laman kec-purwodadi.purworejo.go.id, Pos-el : kec-purwodadi@purworejo.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO NOMOR : 000.8/ 021 /2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

CAMAT PURWODADI,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo yaitu dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja di bawahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Purwodadi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022;
17. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA** : Naskah Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Purwodadi Tahun 2021-2026, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Purwodadi Tahun 2021-2026.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada Tanggal : 3 Januari 2025



CAMAT PURWODADI,

SUMARJANA, S. Sos
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 196906121990011001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 000.8 / 021 / 2025
 TANGGAL : 3 JANUARI 2025
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN 2021-2026

No	Tujuan Peringkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formula	Satuan	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Berkualitas	Hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian: 1)Persyaratan; 2)Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3)Waktu Penyelesaian; 4)Biaya/ Tarif; 5)Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6)Kompetensi Pelaksana; 7)Perilaku Pelaksana; 8)Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; serta 9)Sarana dan Prasarana, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun yang tertentu.ditangani/jumlah permasalahan bidang Ketenteraman dan Keterliban Umum yang seharusnya ditangani X 100%	= Nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (Sembilan) unsur penilaian	indeks	Semua Peringkat Daerah (kecuali Setda dan DPPAPMD)

CAMAT PURWODADI,

 SUMARJANA, S. Sos
 Pembina Tk. I / IV b
 M.P. 196906121990011001



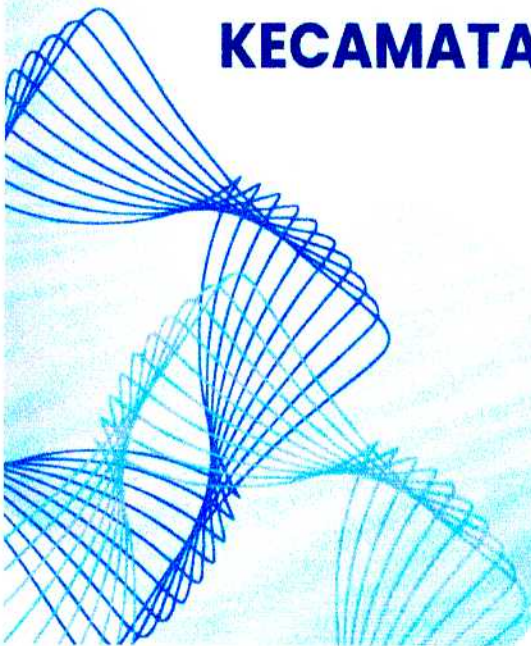
Pemerintah Kabupaten Purworejo
Kecamatan Purwodadi



LAPORAN PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

SEMESTER II TAHUN 2025

KECAMATAN PURWODADI



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
BAB II.....	4
PENGUMPULAN DATA SKM.....	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data.....	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden	6
BAB III.....	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM.....	7
3.1 Jumlah Responden SKM	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	7
BAB IV	9
ANALISIS HASIL SKM	9
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	9
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	10
4.3 Tren Nilai SKM	11
BAB V	12
KESIMPULAN	12
LAMPIRAN.....	13
1. Kuisisioner.....	2
2. Hasil Pengolahan Data	3
3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM.....	4
4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Pada Periode Sebelumnya	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamankan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kecamatan Purwodadi sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan

sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang telah diberikan oleh Kecamatan Purwodadi

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Kecamatan Purwodadi dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Purwodadi adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Kecamatan Purwodadi yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) semester. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Juli 2025	10
2.	Pengumpulan Data	Agustus-Oktober 2025	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	November 2025	10

4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Agustus-November 2025	15
----	--------------------------------	--------------------------	----

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) pada Kecamatan Purwodadi berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2025 semester 1 (satu), maka populasi penerima layanan pada Kecamatan Purwodadi dalam kurun waktu satu tahun adalah kurang lebih sebanyak 136 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 100 orang.

TABEL SAMPEL KREJCIE DAN MORGAN

By : <http://teorionline.wordpress.com/>

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	100000	384

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

1.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 100 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERIS TIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	43	43%
		PEREMPUAN	56	56%
		TIDAK MENGISI	1	1%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	0	0%
		SLTP	0	0%
		SLTA	65	65%
		DIII	3	3%
		SI	32	32%
		S2	0	0%
		TIDAK/BELUM BEKERJA	23	23%
3	PEKERJAAN	IBU RUMAH TANGGA	4	4%
		PELAJAR/MAHASISWA	42	42%
		PNS/PENSIUNAN	4	4%
		SWASTA	13	13%
		GURU	5	5%

		BURUH	3	3%
		KADES DAN PERANGKAT DESA	4	4%
		LAINNYA	1	1%
		TIDAK MENGISI	1	1%
4	JENIS LAYANAN	SKCK	58	58%
		PENGANTAR NIKAH/NUMPANG NIKAH	29	29%
		LAINNYA (SKTM,AHLI WARIS)	13	13%

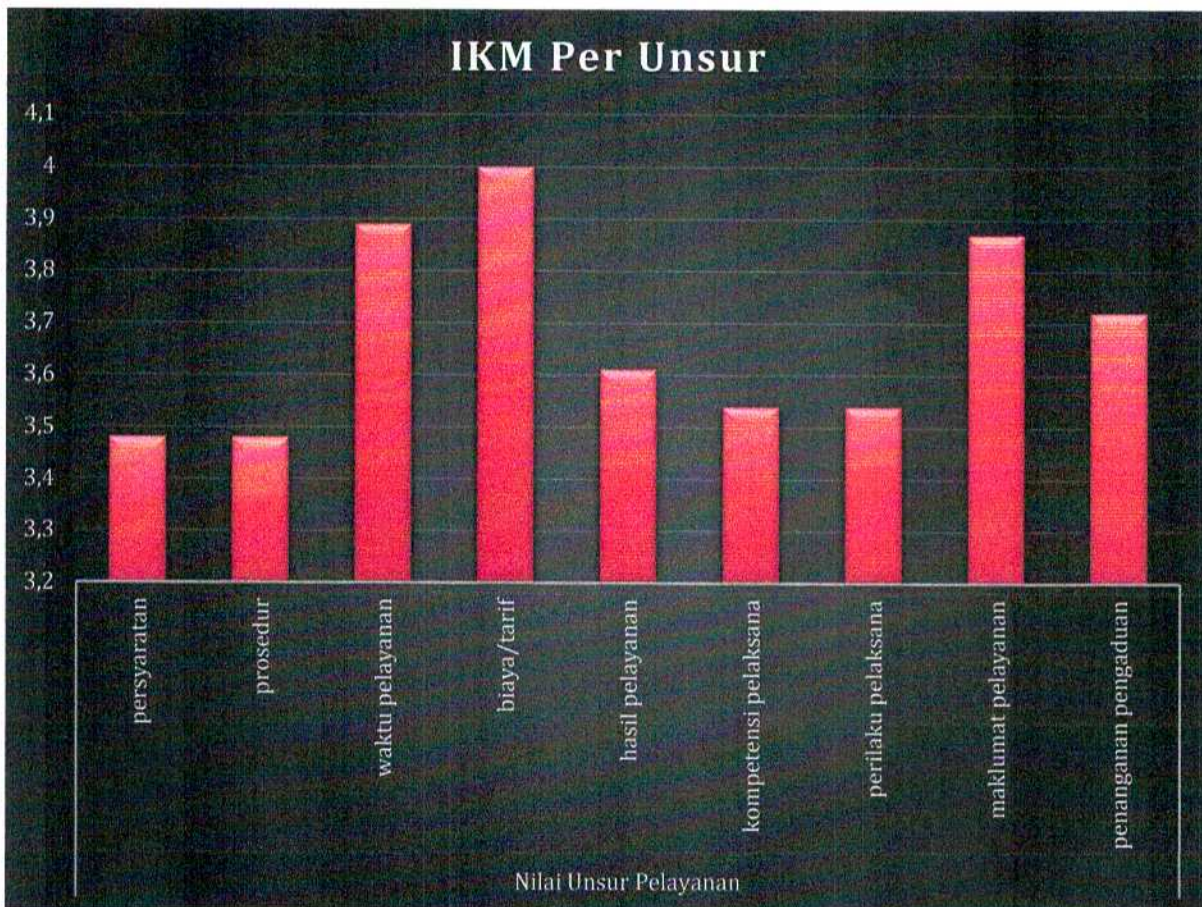
1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM Per Unsur	3,48	3,48	3,89	4	3,61	3,54	3,54	3,87	3,72
Kategori	B	B	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	92,03								
	(A (Sangat Baik))								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Unsur pelayanan persyaratan dan prosedur mendapatkan nilai terendah yaitu 3,48.
2. Sedangkan 3 unsur layanan lainnya mendapat nilai tertinggi yaitu dari unsur Biaya/tarif sebesar 3,89, waktu pelayanan sebesar 4, serta maklumat pelayanan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,87.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Belum ada petunjuk yang jelas mengenai letak ruang permohonan pelayanan publik untuk mengarahkan pengguna layanan letak ruang dan jenis pelayanan yang tersedia.
- Produk spesifikasi/jenis pelayanan yang diberikan dan diterima wajib sesuai dengan ketentuan
- Untuk proses layanan pembuatan KTP agar bisa mencetak blangko di kecamatan dan tidak harus ke disdukcapil kabupaten purworejo.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Untuk efisien dan efektivitas waktu dan biaya layanan rekomendasi percepatan pencairan dana transfer atau lainnya sebaiknya menggunakan sarana online.
- Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil

analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dan evaluasi bersama pejabat struktural dan karyawan/karyawati Kecamatan Purwodadi. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
			I	II	III	IV	
1	Waktu Penyelesaian	Peningkatan sosialisasi registrasi "online"		√	√	√	Camat Purwodadi
2	Prosedur Pelayanan	Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan		√	√	√	Camat Purwodadi
3	Kompetensi Petugas	Memberikan pelatihan khusus terkait <i>service excellent</i>	√	√			Camat Purwodadi

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat

kepuasan penerima Kecamatan Purwodadi dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2025 pada Kecamatan Purwodadi.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Juli hingga November 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Purwodadi, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,03.
- Nilai SKM Kecamatan Purwodadi menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2025.
- Unsur pelayanan persyaratan dan prosedur mendapatkan nilai terendah yaitu 3,48.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi dari unsur Biaya/tarif sebesar 3,89, waktu pelayanan sebesar 4, serta maklumat pelayanan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,87.

Purworejo, November 2025

CAMAT PURWODADI



SUMARJANA, S.SOS

Pembina Tk. I/IV b

NIP 19690612 199001 1 001

LAMPIRAN

1. Nama RT/ RW
2. Nama Kelurahan yang ditunjuk

KOMUNITAS PUSKALAKA
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KORUMBATAN 1975/02

3. Nama Pemangku Kelurahan

4. Nama Pemangku RT/ RW

A. KAWA & MANDUKUNDA

- 1. Nama RT/ RW
- 2. Nama Kelurahan
- 3. Nama Kecamatan
- 4. Nama Kabupaten
- 5. Nama Kota
- 6. Nama Provinsi
- 7. Nama Negara

5. Nama Pemangku Kelurahan

6. Nama Pemangku RT/ RW

7. Nama Pemangku Kelurahan

8. Nama Pemangku RT/ RW

9. Nama Pemangku Kelurahan

10. Nama Pemangku RT/ RW

11. Nama Pemangku Kelurahan

12. Nama Pemangku RT/ RW

13. Nama Pemangku Kelurahan

14. Nama Pemangku RT/ RW

15. Nama Pemangku Kelurahan

16. Nama Pemangku RT/ RW

17. Nama Pemangku Kelurahan

18. Nama Pemangku RT/ RW

19. Nama Pemangku Kelurahan

20. Nama Pemangku RT/ RW

21. Nama Pemangku Kelurahan

22. Nama Pemangku RT/ RW

23. Nama Pemangku Kelurahan

24. Nama Pemangku RT/ RW

25. Nama Pemangku Kelurahan

26. Nama Pemangku RT/ RW

27. Nama Pemangku Kelurahan

28. Nama Pemangku RT/ RW

29. Nama Pemangku Kelurahan

30. Nama Pemangku RT/ RW

31. Nama Pemangku Kelurahan

32. Nama Pemangku RT/ RW

33. Nama Pemangku Kelurahan

34. Nama Pemangku RT/ RW

35. Nama Pemangku Kelurahan

36. Nama Pemangku RT/ RW

37. Nama Pemangku Kelurahan

38. Nama Pemangku RT/ RW

39. Nama Pemangku Kelurahan

40. Nama Pemangku RT/ RW

41. Nama Pemangku Kelurahan

42. Nama Pemangku RT/ RW

43. Nama Pemangku Kelurahan

44. Nama Pemangku RT/ RW

45. Nama Pemangku Kelurahan

46. Nama Pemangku RT/ RW

47. Nama Pemangku Kelurahan

48. Nama Pemangku RT/ RW

49. Nama Pemangku Kelurahan

50. Nama Pemangku RT/ RW

51. Nama Pemangku Kelurahan

52. Nama Pemangku RT/ RW

53. Nama Pemangku Kelurahan

54. Nama Pemangku RT/ RW

55. Nama Pemangku Kelurahan

56. Nama Pemangku RT/ RW

57. Nama Pemangku Kelurahan

58. Nama Pemangku RT/ RW

59. Nama Pemangku Kelurahan

60. Nama Pemangku RT/ RW

61. Nama Pemangku Kelurahan

62. Nama Pemangku RT/ RW

63. Nama Pemangku Kelurahan

64. Nama Pemangku RT/ RW

65. Nama Pemangku Kelurahan

66. Nama Pemangku RT/ RW

67. Nama Pemangku Kelurahan

68. Nama Pemangku RT/ RW

69. Nama Pemangku Kelurahan

70. Nama Pemangku RT/ RW

71. Nama Pemangku Kelurahan

72. Nama Pemangku RT/ RW

73. Nama Pemangku Kelurahan

74. Nama Pemangku RT/ RW

75. Nama Pemangku Kelurahan

76. Nama Pemangku RT/ RW

77. Nama Pemangku Kelurahan

78. Nama Pemangku RT/ RW

79. Nama Pemangku Kelurahan

80. Nama Pemangku RT/ RW

81. Nama Pemangku Kelurahan

82. Nama Pemangku RT/ RW

83. Nama Pemangku Kelurahan

84. Nama Pemangku RT/ RW

85. Nama Pemangku Kelurahan

86. Nama Pemangku RT/ RW

87. Nama Pemangku Kelurahan

88. Nama Pemangku RT/ RW

89. Nama Pemangku Kelurahan

90. Nama Pemangku RT/ RW

91. Nama Pemangku Kelurahan

92. Nama Pemangku RT/ RW

93. Nama Pemangku Kelurahan

94. Nama Pemangku RT/ RW

95. Nama Pemangku Kelurahan

96. Nama Pemangku RT/ RW

97. Nama Pemangku Kelurahan

98. Nama Pemangku RT/ RW

99. Nama Pemangku Kelurahan

100. Nama Pemangku RT/ RW

B. KAWA & MANDUKUNDA

- 1. Nama RT/ RW
- 2. Nama Kelurahan
- 3. Nama Kecamatan
- 4. Nama Kabupaten
- 5. Nama Kota
- 6. Nama Provinsi
- 7. Nama Negara
- 8. Nama Pemangku Kelurahan
- 9. Nama Pemangku RT/ RW
- 10. Nama Pemangku Kelurahan
- 11. Nama Pemangku RT/ RW
- 12. Nama Pemangku Kelurahan
- 13. Nama Pemangku RT/ RW
- 14. Nama Pemangku Kelurahan
- 15. Nama Pemangku RT/ RW
- 16. Nama Pemangku Kelurahan
- 17. Nama Pemangku RT/ RW
- 18. Nama Pemangku Kelurahan
- 19. Nama Pemangku RT/ RW
- 20. Nama Pemangku Kelurahan
- 21. Nama Pemangku RT/ RW
- 22. Nama Pemangku Kelurahan
- 23. Nama Pemangku RT/ RW
- 24. Nama Pemangku Kelurahan
- 25. Nama Pemangku RT/ RW
- 26. Nama Pemangku Kelurahan
- 27. Nama Pemangku RT/ RW
- 28. Nama Pemangku Kelurahan
- 29. Nama Pemangku RT/ RW
- 30. Nama Pemangku Kelurahan
- 31. Nama Pemangku RT/ RW
- 32. Nama Pemangku Kelurahan
- 33. Nama Pemangku RT/ RW
- 34. Nama Pemangku Kelurahan
- 35. Nama Pemangku RT/ RW
- 36. Nama Pemangku Kelurahan
- 37. Nama Pemangku RT/ RW
- 38. Nama Pemangku Kelurahan
- 39. Nama Pemangku RT/ RW
- 40. Nama Pemangku Kelurahan
- 41. Nama Pemangku RT/ RW
- 42. Nama Pemangku Kelurahan
- 43. Nama Pemangku RT/ RW
- 44. Nama Pemangku Kelurahan
- 45. Nama Pemangku RT/ RW
- 46. Nama Pemangku Kelurahan
- 47. Nama Pemangku RT/ RW
- 48. Nama Pemangku Kelurahan
- 49. Nama Pemangku RT/ RW
- 50. Nama Pemangku Kelurahan
- 51. Nama Pemangku RT/ RW
- 52. Nama Pemangku Kelurahan
- 53. Nama Pemangku RT/ RW
- 54. Nama Pemangku Kelurahan
- 55. Nama Pemangku RT/ RW
- 56. Nama Pemangku Kelurahan
- 57. Nama Pemangku RT/ RW
- 58. Nama Pemangku Kelurahan
- 59. Nama Pemangku RT/ RW
- 60. Nama Pemangku Kelurahan
- 61. Nama Pemangku RT/ RW
- 62. Nama Pemangku Kelurahan
- 63. Nama Pemangku RT/ RW
- 64. Nama Pemangku Kelurahan
- 65. Nama Pemangku RT/ RW
- 66. Nama Pemangku Kelurahan
- 67. Nama Pemangku RT/ RW
- 68. Nama Pemangku Kelurahan
- 69. Nama Pemangku RT/ RW
- 70. Nama Pemangku Kelurahan
- 71. Nama Pemangku RT/ RW
- 72. Nama Pemangku Kelurahan
- 73. Nama Pemangku RT/ RW
- 74. Nama Pemangku Kelurahan
- 75. Nama Pemangku RT/ RW
- 76. Nama Pemangku Kelurahan
- 77. Nama Pemangku RT/ RW
- 78. Nama Pemangku Kelurahan
- 79. Nama Pemangku RT/ RW
- 80. Nama Pemangku Kelurahan
- 81. Nama Pemangku RT/ RW
- 82. Nama Pemangku Kelurahan
- 83. Nama Pemangku RT/ RW
- 84. Nama Pemangku Kelurahan
- 85. Nama Pemangku RT/ RW
- 86. Nama Pemangku Kelurahan
- 87. Nama Pemangku RT/ RW
- 88. Nama Pemangku Kelurahan
- 89. Nama Pemangku RT/ RW
- 90. Nama Pemangku Kelurahan
- 91. Nama Pemangku RT/ RW
- 92. Nama Pemangku Kelurahan
- 93. Nama Pemangku RT/ RW
- 94. Nama Pemangku Kelurahan
- 95. Nama Pemangku RT/ RW
- 96. Nama Pemangku Kelurahan
- 97. Nama Pemangku RT/ RW
- 98. Nama Pemangku Kelurahan
- 99. Nama Pemangku RT/ RW
- 100. Nama Pemangku Kelurahan

3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)



1. Kuesioner

Nama SKPD : KECAMATAN PURWODADI
Unit Layanan yang disurvei : PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN (PATEN)
Nama Petugas Survei :

I. DATA RESPONDEN

Nomor Responden : (diisi oleh petugas)
Nama :
No Telp. / HP :
Umur : tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
Pendidikan Terakhir : SLTA ke bawah D 3
 S 1 S 2 ke atas
Pekerjaan :
Jenis layanan yang diterima :
Misal rekomendasi SKCK, KTP, dsb.

II. PERTANYAAN KUESIONER

1. Bagaimana pendapat Saudara kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?
 - a. Tidak sesuai
 - b. Kurang sesuai
 - c. Sesuai
 - d. Sangat sesuai
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan yang ada?
 - a. Tidak mudah
 - b. Kurang mudah
 - c. Mudah
 - d. Sangat mudah
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan ?
 - a. Tidak cepat
 - b. Kurang cepat
 - c. Cepat
 - d. Sangat cepat
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tariff dalam pelayanan ?
 - a. Sangat mahal
 - b. Cukup mahal
 - c. Murah
 - d. Gratis/tidak dipungut biaya
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang hasil pelayanan yang dihasilkan (apakah sesuai dengan harapan) ?
 - a. Tidak sesuai
 - b. Kurang sesuai
 - c. Sesuai
 - d. Sangat sesuai
6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan ?
 - a. Tidak kompeten
 - b. Kurang kompeten
 - c. Kompeten
 - d. Sangat kompeten
7. Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan ?
 - a. Tidak sopan dan ramah
 - b. Kurang sopan dan ramah
 - c. Sopan dan Ramah
 - d. Sangat sopan dan ramah
8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik?
 - a. Buruk
 - b. Cukup
 - c. Baik
 - d. Sangat baik
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan ?
 - a. Tidak ada
 - b. Ada tetapi tidak berfungsi
 - c. Berfungsi kurang maksimal
 - d. Dikelola dengan baik

2. Hasil Olah Data SKM

NILAI IKM	LAYANAN PEMANFAATAN PATEN KECAMATAN PURWODADI		
92,03	JUMLAH	:	100 Orang
	JENIS KELAMIN	:	
	Laki-laki = 43 orang ; Perempuan = 56 orang ; Tidak Mengisi = 1 orang		
	PENDIDIKAN		
	SD/SMP	:	0 Orang
	SMA	:	65 Orang
	DIPLOMA	:	3 Orang
	SARJANA	:	32 Orang
	PASCA SARJANA KEATAS	:	0 Orang
	LAINNYA	:	0 Orang
TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG ANDA BERIKAN			
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT			

Unsur Pelayanan	IKM Per Unsur	Kategori Per Unsur	IKM Unit Layanan	
Kesesuaian Persyaratan	3,48	B	92,03	A (Sangat Baik)
Prosedur Pelayanan	3,48	B		
Kecepatan Pelayanan	3,89	A		
Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	4	A		
Kesesuaian Pelayanan	3,61	A		
Kompetensi Petugas	3,54	A		
Perilaku Petugas Pelayanan	3,54	A		
Penanganan Pengaduan	3,87	A		
Kualitas Sarana dan Prasarana	3,72	A		

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik)	88,31 - 100,00	C (Kurang Baik)	65,00 - 76,60
B (Baik)	76,61 - 88,30	D (Tidak Baik)	25,00 - 64,99

4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya

Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan

Survei Kepuasan Masyarakat

Periode 2025 Semester I



KECAMATAN PURWODADI

KABUPATEN PURWOREJO

2025

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Kecamatan Purwodadi pada Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) perlu

menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses *continuous improvement* dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Kecamatan Purwodadi pada Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) periode Semester I Tahun 2025 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Semester I Tahun 2025

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Kesesuaian Persyaratan	3,48	B
2	Prosedur Pelayanan	3,45	B
3	Kecepatan Pelayanan	3,9	A
4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	4	A
5	Kesesuaian Pelayanan	3,38	B
6	Kompetensi Petugas	3,54	A
7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,5	B
8	Penanganan Pengaduan	3,48	B
9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,9	A


Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Kesesuaian Persyaratan	persyaratan teknis dan administratif yang dibutuhkan untuk suatu layanan publik sudah sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan	V		V		Camat Purwodadi
2	Prosedur Pelayanan	Penerapan Standar Pelayanan oleh Petugas	V		V		Camat Purwodadi
3	Kompetensi Petugas	1.1 Kompetensi petugas dalam melaksanakan tugas	V				Camat Purwodadi
		1.2 Kemampuan petugas dalam memberikan solusi atas kesulitan dan aduan masyarakat	V	V	V	V	Camat Purwodadi

BAB III
REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan/Hambatan
1	persyaratan teknis dan administratif yang dibutuhkan untuk suatu layanan publik sudah sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan	Sudah	Disediakan mesin fotocopy untuk membantu masyarakat yang memerlukan pelayanan PATEN apabila terdapat 1 atau 2 kurang salinan dokumen untuk digandakan		Kurang lengkapnya data dukung dari pengguna layanan
2	Penerapan Standar Pelayanan oleh Petugas	Sudah	Petugas sudah melaksanakan pelayanan sesuai SOP		Perbedaan latanan menentukan waktu penyelesaian

3	Kompetensi petugas dalam melaksanakan tugas	Sudah	Petugas sudah mengikuti pelatihan teknis operator komputer		Petugas membutuhkan peningkatan kompetensi
	Kemampuan petugas dalam memberikan solusi atas kesulitan dan aduan masyarakat	Sudah	Petugas memberikan solusi sesuai dengan kapasitas dan kompetensi petugas		Petugas membutuhkan peningkatan kompetensi

		berbasis online			
--	--	--------------------	--	--	--

Purworejo, November 2025



CAMAT PURWODADI

SUMARJANA, S.Sos

Pembina Tk. I/ IV b

NIP 19690612 199001 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN PURWODADI**

Jalan Panembahan Senopati Km.02 Desa Jenarwetan Kec. Purwodadi, Purworejo Jawa Tengah 54173
Telepon (0275) 756002, Faksimile (0275) 756002
Laman kec-purwodadi.purworejo.go.id, Pos-el kec-purwodadi@purworejo.go.id

Purworejo, 30 Desember 2025

Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
cq. Kabag Administrasi Pembangunan
Setda Kabupaten Purworejo
di
Purworejo

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 900.1.4.1.1/ 3026 /2025

No	Naskah Dinas / Barang yang dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Bulanan Realisasi Kemajuan Fisik dan Keuangan Bulan Desember 2025 Kec Purwodadi Kab Purworejo, dengan : Realisasi Keuangan : Rp. 2.067.597.270 Prosentase Keuangan : 97,13 % Target Fisik : 100 % Realisasi Fisik : 100 %	1 (satu) berkas	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya

Diterima tanggal
Penerima

2025 Camat Purwodadi



SUMARJANA, S. Sos

Pembina Tk. I / IV b

NIP. 196906121990011001

NIP.

LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
S/D BULAN DESEMBER 2025
KECAMATAN PURWODADI

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan						
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%	Fisik %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.939.576.474	19.904.500			1.959.480.974					2.131.058.140	-171.577.166	100	1.899.342.270		1.899.342.270	96,93	100		0
1	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000				1.500.000					4.800.000	-3.300.000	100	1.000.000		1.000.000	66,67	100		0
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500.000				500.000							100	500.000		500.000	100	100		0
		1 Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (100.00)	500.000				500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1					100	500.000		500.000	100	100		0
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	125.000				125.000					750.000	-625.000	100			0	0	100		0
		1 Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (100.00)	125.000				125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1					100			0	0	100		0
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	125.000				125.000					750.000	-625.000	100			0	0	100		0
		1 Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (100.00)	125.000				125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1					100			0	0	100		0
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	125.000				125.000					1.050.000	-925.000	100			0	0	100		0
		1 Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (100.00)	125.000				125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1					100			0	0	100		0
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	125.000				125.000					750.000	-625.000	100			0	0	100		0
		1 Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (100.00)	125.000				125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1					100			0	0	100		0
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	250.000				250.000					750.000	-500.000	100	250.000		250.000	100	100		0
		1 Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (100.00)	250.000				250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1					100	250.000		250.000	100	100		0
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000				250.000					750.000	-500.000	100	250.000		250.000	100	100		0
		1 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100.00)	250.000				250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1					100	250.000		250.000	100	100		0
2	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.667.948.874				1.667.948.874					1.821.753.780	-153.804.906	100	1.619.576.777		1.619.576.777	97,1	100		0
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.666.948.874				1.666.948.874					1.820.653.780	-153.704.906	100	1.619.451.777		1.619.451.777	97,15	100		0
		1 Pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (100.00)	1.666.948.874				1.666.948.874	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1					100	1.619.451.777		1.619.451.777	97,15	100		0
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.000.000				1.000.000					1.100.000	-100.000	100	125.000		125.000	12,5	100		0
		1 Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (100.00)	1.000.000				1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1					100	125.000		125.000	12,5	100		0
3	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	750.000				750.000							100	750.000		750.000	100	100		0
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	750.000				750.000							100	750.000		750.000	100	100		0
		1 Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (100.00)	750.000				750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1				750.000	100	750.000		750.000	100	100		0
4	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	625.000				625.000					925.000	-300.000	100	405.000		405.000	64,8	100		0
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	625.000				625.000					925.000	-300.000	100	405.000		405.000	64,8	100		0
		1 Pelaksanaan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (100.00)	625.000				625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1					100	405.000		405.000	64,8	100		0
5	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.750.000				1.750.000					5.875.000	-4.125.000	100	1.500.000		1.500.000	85,71	100		0
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.750.000				1.750.000					5.875.000	-4.125.000	100	1.500.000		1.500.000	85,71	100		0
		1 Pelaksanaan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (100.00)	1.750.000				1.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1					100	1.500.000		1.500.000	85,71	100		0
6	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.406.400				63.406.400					86.018.260	-22.611.860	100	63.389.900		63.389.900	99,97	100		0
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.509.000				3.509.000					3.514.500	-5.500	100	3.509.000		3.509.000	100	100		0

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Devisi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		1 Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (100.00)	3.509.000				3.509.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	3.514.500	-5.500	100	3.509.000		3.509.000	100	100		0
	7.01.01.2.06.0003	1 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (100.00)	3.442.000				3.442.000					5.293.500	-1.851.500	100	3.442.000		3.442.000	100	100		0
		1 Pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (100.00)	3.442.000				3.442.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	5.293.500	-1.851.500	100	3.442.000		3.442.000	100	100		0
	7.01.01.2.06.0004	1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (100.00)	18.478.800				18.478.800					19.068.000	-589.200	100	18.475.800		18.475.800	99,98	100		0
		1 Pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (100.00)	18.478.800				18.478.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	19.068.000	-589.200	100	18.475.800		18.475.800	99,98	100		0
	7.01.01.2.06.0005	1 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (100.00)	8.983.600				8.983.600					16.076.000	-7.092.400	100	8.983.400		8.983.400	100	100		0
		1 Pelaksanaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (100.00)	8.983.600				8.983.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	16.076.000	-7.092.400	100	8.983.400		8.983.400	100	100		0
	7.01.01.2.06.0006	1 Penyediaan Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-undangan (100.00)	1.332.000				1.332.000					1.332.000	0	100	1.320.000		1.320.000	99,1	100		0
		1 Pelaksanaan Penyediaan Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-undangan (100.00)	1.332.000				1.332.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	1.332.000	0	100	1.320.000		1.320.000	99,1	100		0
	7.01.01.2.06.0007	1 Penyediaan Bahan/Material (100.00)	17.207.700				17.207.700					17.207.700	0	100	17.207.700		17.207.700	100	100		0
		1 Pelaksanaan Penyediaan Bahan/Material (100.00)	17.207.700				17.207.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	17.207.700	0	100	17.207.700		17.207.700	100	100		0
	7.01.01.2.06.0008	1 Fasilitas Kunjungan Tamu (0.00)	0				0					495.000	-495.000	0	0	0	0	0		0	
		1 Pelaksanaan Fasilitas Kunjungan Tamu (0.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	495.000	-495.000	100	0		0	0	100		0
	7.01.01.2.06.0009	1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (100.00)	10.203.300				10.203.300					21.476.560	-11.273.260	100	10.202.000		10.202.000	99,99	100		0
		1 Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (100.00)	10.203.300				10.203.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	21.476.560	-11.273.260	100	10.202.000		10.202.000	99,99	100		0
	7.01.01.2.06.0010	1 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (100.00)	250.000				250.000					1.555.000	-1.305.000	100	250.000		250.000	100	100		0
		1 Pelaksanaan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (100.00)	250.000				250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	1.555.000	-1.305.000	100	250.000		250.000	100	100		0
	7.01.01.2.07	1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100.00)	19.904.500				19.904.500					26.588.100	-6.683.600	100	19.580.400		19.580.400	98,37	100		0
		1 Pelaksanaan Pengadaan Mebel (100.00)	19.904.500				19.904.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	26.588.100	-6.683.600	100	19.580.400		19.580.400	98,37	100		0
	7.01.01.2.07.0005	1 Pelaksanaan Pengadaan Mebel (100.00)	19.904.500				19.904.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	26.588.100	-6.683.600	100	19.580.400		19.580.400	98,37	100		0
	7.01.01.2.08	1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100.00)	131.533.200				131.533.200					79.338.000	52.195.200	100	121.100.430		121.100.430	92,07	100		0
		1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (100.00)	48.919.200				48.919.200							100	38.835.017		38.835.017	79,39	100		0
		1 Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (100.00)	48.919.200				48.919.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		48.919.200	100	38.835.017		38.835.017	79,39	100		0
	7.01.01.2.08.0004	1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (100.00)	82.614.000				82.614.000					79.338.000	3.276.000	100	82.265.413		82.265.413	99,58	100		0
		1 Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (100.00)	82.614.000				82.614.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	79.338.000	3.276.000	100	82.265.413		82.265.413	99,58	100		0
	7.01.01.2.09	1 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100.00)	72.063.000				72.063.000					105.760.000	-33.697.000	100	72.039.763		72.039.763	99,97	100		0
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (100.00)	38.220.000				38.220.000					38.220.000	0	100	38.219.087		38.219.087	100	100		0
		1 Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (100.00)	38.220.000				38.220.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	38.220.000	0	100	38.219.087		38.219.087	100	100		0
	7.01.01.2.09.0002	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (100.00)	10.540.000				10.540.000					27.650.000	-17.110.000	100	10.540.000		10.540.000	100	100		0
		1 Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (100.00)	10.540.000				10.540.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	27.650.000	-17.110.000	100	10.540.000		10.540.000	100	100		0

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan						
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%	Fisik %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.030.000				5.030.000					6.410.000	-1.380.000	100	5.030.000		5.030.000	100	100		0
		1 Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100,00)	5.030.000				5.030.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	6.410.000	-1.380.000	100	5.030.000		5.030.000	100	100		0
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.833.000				15.833.000					31.040.000	-15.207.000	100	15.810.676		15.810.676	99,86	100		0
		1 Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (100,00)	15.833.000				15.833.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	31.040.000	-15.207.000	100	15.810.676		15.810.676	99,86	100		0
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.440.000				2.440.000					2.440.000	0	100	2.440.000		2.440.000	100	100		0
		1 Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (100,00)	2.440.000				2.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	2.440.000	0	100	2.440.000		2.440.000	100	100		0
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.955.000				12.955.000					41.967.000	-29.012.000	100	12.955.000		12.955.000	100	100		0
10	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.575.000				5.575.000					9.062.000	-3.487.000	100	5.575.000		5.575.000	100	100		0
		1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.925.000				2.925.000					4.950.000	-2.025.000	100	2.925.000		2.925.000	100	100		0
		1 Pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (100,00)	2.925.000				2.925.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	4.950.000	-2.025.000	100	2.925.000		2.925.000	100	100		0
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.650.000				2.650.000					4.112.000	-1.462.000	100	2.650.000		2.650.000	100	100		0
		1 Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (100,00)	2.650.000				2.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	4.112.000	-1.462.000	100	2.650.000		2.650.000	100	100		0
11	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.975.000				6.975.000					32.905.000	-25.930.000	100	6.975.000		6.975.000	100	100		0
		1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4.325.000				4.325.000					26.075.000	-21.750.000	100	4.325.000		4.325.000	100	100		0
		1 Pelaksanaan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (100,00)	4.325.000				4.325.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	26.075.000	-21.750.000	100	4.325.000		4.325.000	100	100		0
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.650.000				2.650.000					6.830.000	-4.180.000	100	2.650.000		2.650.000	100	100		0
		1 Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (100,00)	2.650.000				2.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025	6.830.000	-4.180.000	100	2.650.000		2.650.000	100	100		0
12	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	405.000				405.000							100	405.000		405.000	100	100		0
		1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	0				0							0	0	0	0	0	0		0
		1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan (0,00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025			0	0	0	0	0	0		0
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	405.000				405.000							100	405.000		405.000	100	100		0
		1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (100,00)	405.000				405.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Dec-2025		405.000	100	405.000		405.000	100	100		0
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	91.264.000				91.264.000					91.264.000	0	100	91.264.000		91.264.000	100	100		0
13	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	91.264.000				91.264.000					91.264.000	0	100	91.264.000		91.264.000	100	100		0
		1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21.463.000				21.463.000					21.463.000	0	100	21.463.000		21.463.000	100	100		0

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Devisi Fisik (%)	KRT
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan						
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%	Fisik %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Pelaksanaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (100.00)	21.463.000				21.463.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025	21.463.000	0	100	21.463.000		21.463.000	100	100		0
7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	69.801.000				69.801.000					69.801.000	0	100	69.801.000		69.801.000	100	100		0
		Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (100.00)	69.801.000				69.801.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025	69.801.000	0	100	69.801.000		69.801.000	100	100		0
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.291.000				10.291.000					31.127.000	-20.836.000	100	10.291.000		10.291.000	100	100		0
14	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.291.000				10.291.000					31.127.000	-20.836.000	100	10.291.000		10.291.000	100	100		0
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.190.000				3.190.000					17.385.000	-14.195.000	100	3.190.000		3.190.000	100	100		0
		Pelaksanaan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (100.00)	3.190.000				3.190.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025	17.385.000	-14.195.000	100	3.190.000		3.190.000	100	100		0
7.01.04.2.01.0002		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.101.000				7.101.000					13.742.000	-6.641.000	100	7.101.000		7.101.000	100	100		0
		Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (100.00)	7.101.000				7.101.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025	13.742.000	-6.641.000	100	7.101.000		7.101.000	100	100		0
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.050.000				17.050.000					6.260.000	10.790.000	100	17.050.000		17.050.000	100	100		0
15	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah	17.050.000				17.050.000					6.260.000	10.790.000	100	17.050.000		17.050.000	100	100		0
		fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3.710.000				3.710.000					6.260.000	-2.550.000	100	3.710.000		3.710.000	100	100		0
		Pelaksanaan Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (100.00)	3.710.000				3.710.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025	6.260.000	-2.550.000	100	3.710.000		3.710.000	100	100		0
7.01.05.2.01.0008		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13.340.000				13.340.000							100	13.340.000		13.340.000	100	100		0
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (100.00)	13.340.000				13.340.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025		13.340.000	100	13.340.000		13.340.000	100	100		0
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	37.595.000				37.595.000					84.573.000	-46.978.000	100	36.695.000		36.695.000	97,61	100		0
16	7.01.06.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37.595.000				37.595.000					84.573.000	-46.978.000	100	36.695.000		36.695.000	97,61	100		0
		Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.385.000				2.385.000					4.950.000	-2.565.000	100	2.385.000		2.385.000	100	100		0
		Pelaksanaan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (100.00)	2.385.000				2.385.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025	4.950.000	-2.565.000	100	2.385.000		2.385.000	100	100		0
7.01.06.2.01.0002		Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.985.000				3.985.000					7.370.000	-3.385.000	100	3.985.000		3.985.000	100	100		0
		Pelaksanaan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa (100.00)	3.985.000				3.985.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025	7.370.000	-3.385.000	100	3.985.000		3.985.000	100	100		0
7.01.06.2.01.0003		Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.120.000				2.120.000					6.485.000	-4.365.000	100	2.120.000		2.120.000	100	100		0
		Pelaksanaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (100.00)	2.120.000				2.120.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025	6.485.000	-4.365.000	100	2.120.000		2.120.000	100	100		0
7.01.06.2.01.0005		Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.750.000				20.750.000					43.760.000	-23.010.000	100	19.850.000		19.850.000	95,66	100		0
		Pelaksanaan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (100.00)	20.750.000				20.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025	43.760.000	-23.010.000	100	19.850.000		19.850.000	95,66	100		0
7.01.06.2.01.0007		Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.240.000				4.240.000					9.880.000	-5.640.000	100	4.240.000		4.240.000	100	100		0

No.	Rek.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KKT
			Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
															Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		19 Pelaksanaan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (100.00)	4.240.000				4.240.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025	9.880.000	-5.640.000	100	4.240.000		4.240.000	100	100		0
7.01.06.2.01.0008		1 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025	1.700.000	-1.700.000	0			0	0	0		0
		1 Pelaksanaan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (0.00)	0				0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025	1.700.000	-1.700.000	100			0	0	100		0
7.01.06.2.01.0009		1 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.200.000				1.200.000					4.155.000	-2.955.000	100	1.200.000		1.200.000	100	100		0
		1 Pelaksanaan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (100.00)	1.200.000				1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025	4.155.000	-2.955.000	100	1.200.000		1.200.000	100	100		0
7.01.06.2.01.0012		1 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.590.000				1.590.000					3.285.000	-1.695.000	100	1.590.000		1.590.000	100	100		0
		1 Pelaksanaan Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (100.00)	1.590.000				1.590.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025	3.285.000	-1.695.000	100	1.590.000		1.590.000	100	100		0
7.01.06.2.01.0018		1 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1.325.000				1.325.000					2.988.000	-1.663.000	100	1.325.000		1.325.000	100	100		0
		1 Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (100.00)	1.325.000				1.325.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2025 s/d 31-Des-2025	2.988.000	-1.663.000	100	1.325.000		1.325.000	100	100		0
		Jumlah	2.108.731.474	19.904.500			2.128.635.974					2.384.249.140	-233.419.146	100	2.067.597.270		2.067.597.270	97,13	100		0



Purworejo, 30 Desember 2025

CAMAT PURWODADI

SUMARJANA, S.Sos.

NIP. 196906121990011001